



Indonesia

Laporan Tahunan Tentang Praktek Hak Asasi Manusia – 2004 Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh 28 Februari 2005

Indonesia merupakan suatu negara republik dengan sistem presidential dan tiga cabang pemerintahan. Presiden adalah kepala negara dan menjabat selama masa jabatan lima-tahun untuk maksimum dua kali masa jabatan. Pada tanggal 20 Oktober, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang terpilih secara langsung di negara tersebut, dilantik setelah mengalahkan Presiden Megawati Soekarnoputri yang sedang memegang jabatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersidang sekali dalam lima tahun, memiliki kekuasaan untuk merubah Undang-Undang Dasar. Urusan legislatif rutin, termasuk mengesahkan perundang-undangan, merupakan tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama tahun ini Pemerintah membuat kemajuan lebih lanjut dalam transisinya dari 3 dekade kekuasaan yang menindas dan otoriter ke suatu demokrasi yang lebih pluralistis dan representatif. Negara ini menyelenggarakan pemilihan legislatif yang berhasil dan pemilihan presiden langsung yang bebas, adil dan aman. Sebelumnya, badan legislatif yang memilih presiden. Pemerintah selanjutnya mengurangi peranan politik formal dari polisi dan militer, yang dalam bulan Oktober melepaskan kursi mereka yang ditetapkan di DPR, pada saat badan legislatif yang baru diambil sumpahnya. Undang-Undang Dasar menetapkan suatu badan peradilan yang independen, namun, di dalam praktek pengadilan tetap terkena pengaruh luar, termasuk dari badan eksekutif.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi mempunyai tanggung jawab terhadap pertahanan eksternal, dan Polisi Republik Indonesia untuk keamanan internal; namun di dalam praktek, pembagian tanggung jawab tetap tidak jelas. Bersama-sama keduanya dikenal sebagai satuan keamanan. Militer memainkan suatu peranan dalam masalah keamanan internal, khususnya di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua (sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya). Terdapat friksi yang besar antara polisi dan TNI, tetapi operasi bersama adalah umum di daerah-daerah konflik. Seorang menteri pertahanan sipil mengontrol militer tetapi di dalam praktek hanya melakukan pengawasan yang terbatas terhadap kebijakan dan operasi TNI. Militer dan polisi terus menggunakan pengaruh politik yang signifikan maupun kekuasaan ekonomi melalui bisnis yang dioperasikan oleh anggota satuan keamanan, wakil dan yayasan mereka. Satuan keamanan memperlihatkan kemauan yang lebih besar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia di kalangan mereka; selama tahun ini, ratusan prajurit dihadapkan ke depan pengadilan militer, dan lusinan petugas polisi dipecat atau didisiplinkan. Namun, sebagian besar tindakan disipliner tersebut melibatkan petugas berpangkat-rendah dan kadang-kadang petugas berpangkat-menengah yang melakukan kejahatan ringan, seperti pemukulan, dan dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan tindak kejahatannya. Para anggota satuan keamanan terus melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya di daerah-daerah konflik separatis.

Selama tahun ini, ekonomi, yang semakin dikendalikan pasar, diprediksi tumbuh sekitar 4,8 persen; namun, hal ini tidak berhasil mengurangi pengangguran atau menyerap sekitar 2,5 juta pencari kerja baru yang memasuki pasar setiap tahun. Jumlah penduduk kira-kira 238 juta. Angka kemiskinan turun dari 27 persen dalam tahun 1999 menjadi 16 persen dalam tahun 2002; namun, meningkat sedikit menjadi kira-kira 17,5 persen selama tahun ini. Perkiraan penghasilan per kapita adalah US\$ 867. Permintaan konsumen merupakan kekuatan utama dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Pada akhir tahun wilayah Sumatera Utara dilanda gempa bumi dan tsunami, keduanya mengakibatkan sekitar 240.000 orang meninggal dan hilang di Propinsi Aceh dan Sumatera Utara dan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas di Propinsi Aceh.

Catatan hak asasi manusia Pemerintah tetap buruk; walaupun ada perbaikan dalam beberapa bidang, masalah-masalah serius tetap ada. Petugas Pemerintah terus melakukan kekejaman, dan yang paling berat di antaranya terjadi di daerah-daerah konflik separatis. Anggota satuan keamanan membunuh, menganiaya,

memperkosa, memukul, dan secara sewenang-wenang menahan warga sipil serta para anggota gerakan separatis, khususnya di Aceh dan pada tingkat yang lebih kecil di Papua. Beberapa petugas polisi kadang-kadang menggunakan kekuatan yang berlebihan dan kadangkala mematikan dalam menahan tersangka dan dalam usaha untuk memperoleh informasi atau pengakuan. Para perwira militer purnawirawan dan yang masih bertugas aktif, yang diketahui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, menduduki atau dipromosikan ke jabatan-jabatan senior di lembaga pemerintahan dan TNI. Kondisi penjara tetap kejam. Sistem peradilan korup, yang menambah kegagalan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia atau meminta pertanggung jawaban para pelaku. Para pelanggar dari satuan keamanan kadang-kadang menggunakan intimidasi dan penyipuan untuk menghindari keadilan. Perselisihan tanah menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut seringkali melibatkan pengusiran paksa, beberapa diselesaikan dengan kekuatan yang mematikan. Sebagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah memenjarakan beberapa pemrotas damai anti-pemerintah karena “menghina Presiden” atau “menyebarkan kebencian terhadap pemerintah”. Para politikus dan pembesar memperlihatkan keinginan yang lebih besar untuk mengambil tindakan hukum terhadap organisasi-organisasi berita yang menurut mereka pemberitaannya menghina atau menyerang, dan kecenderungan ini mempunyai suatu akibat yang menakutkan bagi beberapa pemberitaan investigatif. Para anggota satuan keamanan dan kelompok-kelompok lain kadang-kadang membatasi kebebasan berekspresi dengan mengintimidasi atau menyerang wartawan yang tulisannya menurut mereka tidak dapat diterima. Pemerintah membatasi pers asing untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah konflik di Aceh, Papua, Sulawesi dan Maluku. Pihak yang berwenang kadang-kadang mentolerir diskriminasi dan perlakuan kejam terhadap kelompok agama oleh para pelaku-pelaku individual. Pemerintah seringkali membatasi kegiatan organisasi non-pemerintah (LSM), khususnya di Aceh dan Papua. Perempuan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) terjadi di beberapa daerah, walaupun jenis yang dipraktekkan sebagian besar bersifat simbolis. Pelanggaran seks dan kekerasan terhadap anak tetap merupakan masalah serius. Perdagangan orang merupakan suatu masalah yang serius. Diskriminasi terhadap orang cacat dan penganiayaan terhadap penduduk asli merupakan masalah. Pemerintah mengizinkan pembentukan dan pengoperasian serikat-serikat pekerja baru, tetapi seringkali gagal untuk menegakkan standar-standar tenaga kerja atau menangani pelanggaran terhadap hak pekerja. Pekerja anak yang dipaksa tetap merupakan masalah yang serius.

Para teroris, orang-orang sipil dan kelompok-kelompok separatis bersenjata juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Negara ini juga membuat kemajuan yang besar dalam memperkuat demokrasi. Ada serangkaian tiga pemilihan umum nasional, di mana secara khusus partisipasi pemilih adalah tinggi dan peralihan dari Presiden yang kalah ke Presiden terpilih yang baru berlangsung aman. Militer dan polisi kehilangan kursi mereka yang tidak dipilih di DPR. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal, dan mengambil langkah-langkah untuk menangani perdagangan orang, termasuk menuntut para pelaku dan memperkuat undang-undang anti-perdagangan orang. Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan yang mengizinkan pembentukan suatu Dewan Rakyat Papua dengan 40 anggota. Pemerintahan juga mengambil langkah-langkah hukum yang serius untuk mengadili para teroris.

PENGHARGAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bagian 1. Penghargaan Terhadap Integritas Seseorang, Termasuk Kebebasan Dari:

a. Perampasan Hidup Sewenang-wenang atau Diluar Hukum

Satuan keamanan terus melakukan pembunuhan tidak syah terhadap pemberontak, yang diduga pemberontak, dan warga sipil di daerah-daerah kegiatan separatis, di mana sebagian besar pembunuhan di luar hukum yang dimotivasi politik juga terjadi. Ada bukti bahwa TNI menganggap setiap orang yang dibunuhnya di daerah konflik adalah seorang pemberontak bersenjata. Satuan keamanan juga melakukan pembunuhan di luar hukum yang non-politik. Pemerintah pada umumnya gagal untuk meminta pertanggung jawaban para prajurit dan polisi atas pembunuhan-pembunuhan tersebut dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Aceh.

TNI mengadili, memenjarakan, dan memecat beberapa prajurit karena melakukan perkosaan, perampokan, dan penganiayaan; namun, tidak ada anggota satuan keamanan yang dituntut terhadap pembunuhan di luar hukum di Aceh (lihat Bagian 1.d.).

Personil militer dan polisi di Aceh melakukan pembunuhan di luar hukum dan menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap orang-orang yang tidak berperang. Pemerintah menempatkan Aceh di bawah darurat militer dari 19 Mei 2003 sampai 18 Mei, saat Pemerintah memberlakukan suatu keadaan darurat sipil. Pemerintah melanjutkan langkah-langkah luar biasa yang sama yang dilakukan selama darurat militer pada masa darurat sipil, termasuk pembatasan yang keras terhadap kemerdekaan sipil, yang menciptakan kekuasaan yang luar biasa bagi satuan keamanan, yang terus dioperasikan dengan pembatasan-pembatasan yang banyak dikurangi. Selama masa darurat sipil, TNI terus menggunakan wewenang darurat militer untuk melakukan penahanan, suatu wewenang hukum yang biasanya diperuntukkan bagi polisi. Pusat media TNI di Lhokseumawe, Aceh, melaporkan bahwa TNI telah menewaskan 1.883 pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menahan paling sedikit 1.529 orang, dan bahwa 1.137 yang lain menyerahkan diri kepada TNI antara bulan Mei 2003 dan Nopember. Pada akhir tahun, tsunami yang dasyat melanda wilayah tersebut dan mengakibatkan suatu penghentian permusuhan sementara yang dideklarasikan secara sepihak oleh TNI dan GAM.

Informasi yang akurat, independen dan terbaru tentang jumlah pemberontak GAM dan orang lain yang terbunuh di Aceh, sulit untuk diperoleh. Menurut koalisi LSM di Aceh, paling sedikit 57 warga sipil, 251 anggota GAM, dan 21 personil keamanan terbunuh antara bulan Januari dan Oktober. Para penguasa darurat militer membatasi informasi, melarang akses bagi wartawan asing, dan melarang kontak dengan GAM. Sampai tsunami melanda pada tanggal 26 Desember, Pemerintah secara efektif melarang para pekerja bantuan kemanusiaan asing, kecuali sejumlah pekerja PBB yang terbatas, untuk memasuki propinsi tersebut. Data dari sumber-sumber yang berbeda, bahkan di dalam Pemerintah, sering bertentangan. Sumber-sumber LSM sering mempertanyakan angka-angka korban yang diumumkan oleh satuan keamanan, dan mereka menyatakan bahwa jumlah korban jauh lebih tinggi dan bahwa banyak dari mereka yang tewas adalah warga sipil. Satuan keamanan dan pemberontak memberikan informasi yang bertentangan tentang identitas para korban, yang menyulitkan untuk menentukan perincian dari kematian warga sipil, pemberontak dan satuan keamanan. Secara rutin pers berada di bawah tekanan untuk hanya melaporkan angka korban yang resmi, yang mungkin melaporkan jumlah yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya dari korban warga sipil dan satuan keamanan. Polisi jarang menyelidiki pembunuhan di luar hukum dan hampir tidak pernah melaporkan penyelidikan tersebut.

Amnesti Internasional (AI) melaporkan bahwa seorang petani dari kecamatan Kuala Simpang, Aceh Timur, melarikan diri ke luar daerah setelah dua orang laki-laki di desanya dibunuh oleh militer dalam satu bulan. Menurut petani tersebut, orang yang pertama adalah salah bunuh karena dia mempunyai nama yang sama dengan seorang anggota GAM yang dicurigai, dan orang yang kedua ditangkap dan dibunuh selama suatu operasi pembersihan terhadap anggota GAM. Sebagian besar pembunuhan adalah terhadap para pemuda yang dicurigai sebagai anggota GAM; namun, ada juga laporan di dalam media tentang pembunuhan yang melanggar hukum terhadap perempuan dan anak-anak.

Pemerintah tidak membuat kemajuan dalam membuat pertanggung jawaban terhadap sejumlah pembunuhan di luar hukum di Aceh dalam tahun 2003, termasuk pembunuhan tanggal 16 Juni terhadap Muzakkir Abdullah dan pembunuhan bulan Mei terhadap Muhammad Jamaluddin. Tidak ada perkembangan yang diketahui dalam pembunuhan bulan Mei 2003 oleh para prajurit TNI terhadap 10 orang laki-laki di desa Cot Rebo di Aceh. Juga tidak ada kemajuan yang dibuat dalam meminta pertanggung jawaban terhadap pembunuhan di luar hukum di Aceh dalam tahun 2002, termasuk pembunuhan bulan Juni terhadap dua orang petani di Gunung Kayee Ciret dan pembunuhan bulan Agustus terhadap tiga orang perempuan di desa Kandang, Aceh Utara.

Selama tahun ini, para anggota GAM membunuh banyak prajurit, polisi, pegawai negeri, dan warga sipil. Dalam banyak kejadian, para korban dibunuh karena diduga bekerjasama dengan satuan keamanan, sementara pada kejadian yang lain, tampaknya motifnya adalah kriminal. Walaupun banyak orang Aceh takut dan benci terhadap satuan keamanan, banyak juga yang takut dan diintimidasi oleh GAM disebabkan oleh pemerasan dan kegiatan kriminalnya serta penderitaan berat bagi orang Aceh yang disebabkan oleh pemberontakan GAM yang telah berlangsung untuk waktu yang lama. Pada tanggal 5 Februari, pasukan TNI menemukan tubuh dari empat warga sipil di dalam hutan di dekat Peureulak, Aceh Timur. Keempatnya tewas karena luka tembakan. TNI yakin bahwa mereka adalah para sandera GAM. Pada tanggal 11 Februari,

pemberontak GAM Junaedi diduga menembak dan menewaskan warga sipil Cut Musdaifah di desa Wakheuh. Menurut para saksi, dua orang bersenjata memaksa Musdaifah untuk menemani mereka dan menembaknya saat ia berusaha untuk melarikan diri. Pada tanggal 24 Maret, para pemberontak GAM diduga menembak dan menewaskan Muhammad Amin, seorang calon anggota legislatif setempat. TNI yakin bahwa GAM membuat warga sipil, yang mendukung pemilihan umum mendatang, sebagai sasaran. Juga pada tanggal 24 Maret sekelompok orang bersenjata, yang diyakini sebagai pemberontak GAM, menembak dan menewaskan seorang paramedik di Aceh Selatan; TNI yakin bahwa pemerasan merupakan motif dari penyerangan tersebut.

Pemerintah melaporkan kemajuan yang terbatas dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan melanggar hukum yang kemungkinan dilakukan oleh anggota GAM dalam tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh Zaini Sulaiman, Sukardi, Sulaiman Ahmad, Tengku Safwan Idris, dan Nashiruddin Daud. Suatu penyelidikan polisi atas pembunuhan tahun 2001 terhadap Dayan Daewood, rektor dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang ditembak setelah menawarkan untuk menjadi perantara antara GAM dan Pemerintah, membawa kepada penangkapan dan penghukuman atas Mahyeddin bin M. Adan dengan 17 tahun penjara.

Tidak ada perkembangan yang diketahui tentang kasus-kasus berikut dalam tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya atas pembunuhan di luar hukum, yang tidak bisa secara jelas dihubungkan dengan satuan keamanan ataupun pemberontak GAM: pengeboman bulan Desember 2003 yang menewaskan 9 orang di suatu konser terbuka di Peureulak; pembunuhan bulan Juli 2003 terhadap Cut Aca Budi, mantan anggota GAM; pembunuhan bulan Juli 2003 terhadap guru sekolah Muslim Sulaiman dan isterinya Darmawati; pembunuhan bulan Mei 2003 terhadap Jamaluddin Hasany, seorang anggota legislatif setempat; kuburan massal yang ditemukan dalam tahun 2003 di Kecamatan Nisam dan Permata; pembunuhan tahun 2003 terhadap 6 orang di kota Lombaro Angan, Kecamatan Aceh Besar; pembunuhan tahun 2002 terhadap 2 siswi SMA di desa Gumpueng Tiro, kabupaten Pidie; dan pembunuhan besar-besaran tahun 2001 terhadap 31 orang di suatu perkebunan kelapa sawit di Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Pada tanggal 7 September, Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia yang terkemuka, ditemukan tewas dalam suatu penerbangan dari Jakarta ke Belanda. Pemerintah Belanda mengumumkan bahwa suatu laporan otopsi menunjukkan bahwa sebab kematian adalah keracunan arsenik. Insiden tersebut masih dalam penyelidikan pada akhir tahun ini.

Di Sulawesi Tengah, ketegangan politik dan ekonomi antara penduduk Kristen dan Muslim yang berjumlah kira-kira sama, terus menyebabkan kekerasan. Sejumlah 22 orang tewas dalam kekerasan massa, jumlah yang sama seperti dalam tahun 2003. Pembunuhan di luar hukum termasuk serangkaian penembakan oleh para penembak yang tidak teridentifikasi, kelanjutan I dari kecenderungan yang sudah dimulai dalam tahun 2003. Pada tanggal 30 Maret, para penembak yang identitasnya tidak diketahui menembak dan menewaskan jaksa Feri Silalahi, seorang Kristen, di Palu, setelah dia dan keluarganya pulang dari suatu kebaktian agama. Silalahi adalah jaksa kepala di dalam persidangan yang masih berlanjut terhadap tiga tertuduh kakitangan pengeboman Bali. Kenyataan bahwa para penyerang hanya menembak Silalahi, dan membiarkan isteri dan anak-anaknya tanpa dilukai, memberikan kesan adanya suatu pembunuhan. Pada tanggal 18 Juli, dua penyerang yang tidak teridentifikasi menembak dan menewaskan Pendeta Susianti Tinulele di Palu. Insiden-insiden tersebut tetap tidak terselesaikan sampai akhir tahun. Selama tahun ini, 12 tersangka ditahan atas penyerangan bulan Oktober 2003 di Beteleme, di mana paling sedikit 14 orang tewas. Pengadilan Negeri Palu menyatakan 11 orang bersalah dan memberikan putusan penjara yang berkisar antara 3 sampai 4 tahun; 1 orang tersangka dibebaskan karena kekurangan bukti. Dilaporkan bahwa sebagian besar penduduk puas dengan hasil dari penyelidikan dan persidangan. Tidak ada kemajuan yang dilaporkan dalam penyelidikan polisi atas penyerangan bulan Oktober 2003 terhadap sebagian besar desa-desa Kristen, di mana 10 orang terbunuh, atau atas pembunuhan bulan Oktober 2003 terhadap 2 orang laki-laki di desa-desa pesisir Kilo Trans, Poso, yang merupakan tempat tinggal para migran Bali, dan 2 orang laki-laki di desa Kristen Marowo.

Di Maluku dan Maluku Utara, pembunuhan di luar hukum meningkat dari tahun 2003 saat kekerasan sektarian pecah pada tanggal 25 April setelah suatu peringatan hari ulang tahun separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam kekerasan yang menyusul, paling sedikit 40 orang terbunuh dan kira-kira 260 orang cidera. Minggu-minggu berikutnya dikotori oleh kekerasan sporadis dan peledakan bom kecil yang menghancurkan sekitar 356 gedung, termasuk sebuah gereja dan sebuah masjid. Pada bulan Juni, perjanjian damai dengan perantara pemerintah telah dipulihkan antara kedua komunitas agama tersebut.

Pemerintah melaporkan sedikit kemajuan dalam membuat pertanggung jawaban atas kasus-kasus berikut di Poso: peledakan sebuah bom bulan Juli 2003 di suatu kedai minum di desa Sayo, yang membunuh satu orang dan menciderai lima orang lain; penembakan dalam bulan Juni 2003 terhadap dua orang di desa Kapompa; pengeboman tahun 2002 terhadap sebuah bis penumpang yang padat, yang membunuh lima orang; dan banyak tindakan kejahatan lain yang dilakukan di propinsi tersebut oleh para anggota bekas Laskar Jihad.

Pemerintah membuat sedikit kemajuan selama tahun ini dalam membuat pertanggung jawaban terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut pada tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya. Dalam bulan Februari, para jaksa penuntut di Maluku mengajukan tuntutan terhadap beberapa orang karena pembunuhan dua warga sipil selama konflik sektarian tahun 1999 – 2002 di wilayah tersebut.

Di propinsi Papua, pemerintah terus melakukan operasi terhadap para pemberontak dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan para pemberontak OPM terus melakukan operasi mereka terhadap unit-unit militer. Juga di Papua, TNI dan Polisi melanjutkan penyelidikan bersama terhadap penyerangan tahun 2002 yang membunuh 2 warga Amerika dan 1 orang Indonesia serta menciderai 12 orang lain di dekat sebuah tambang emas dan tembaga yang besar di dekat kota Timika. Pada tanggal 16 Juni, sebuah pengadilan asing menuntut Anthonious Wamang, seorang gerilyawan OPM, mempunyai kaitan dengan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Pada akhir tahun Wamang tetap bebas, dan penyelidikan tetap terbuka.

Pemerintah membuat kemajuan yang terbatas dalam menetapkan pertanggung jawaban bagi banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Papua pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang dilakukan di Biak, Abepura, Wasior, dan Wamena. Pada tahun tersebut, suatu pengadilan hak asasi manusia di Makassar mulai melakukan tindakan hukum terhadap polisi yang terlibat kekejaman dan pembunuhan terhadap orang Papua dalam suatu insiden tahun 2000 di Abepura. Komnas HAM yang dibentuk dan didanai Pemerintah, namun bukan merupakan suatu instansi pemerintah, menyelesaikan laporannya tentang insiden Wasior tahun 2001, di mana polisi menurut dugaan membunuh 12 warga sipil menyusul serangan terhadap suatu pos polisi yang mengakibatkan 5 anggota polisi tewas, dan insiden Wamena, di mana lusinan penduduk daerah Dataran Tinggi Tengah Kuyowage menurut dugaan telah disiksa oleh pihak-pihak yang tidak dikenal selama suatu operasi militer, menyusul pembongkaran di gudang senjata Wamena pada bulan April 2003. Komisi menemukan bahwa para prajurit dan polisi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pembunuhan, pengusiran, dan penganiayaan. Komnas HAM mengkategorikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pada tanggal 2 September menyampaikan laporannya kepada Kejaksaan Agung untuk kemungkinan penuntutan (Lihat Bagian 1.e).

Polisi sering kali menggunakan kekuatan yang mematikan untuk menahan para tersangka atau bertindak sembrono dalam mengejar para tersangka, dan tindakan-tindakan tersebut kadang-kadang mengakibatkan kematian warga sipil. Dalam kasus lain, para tersangka di dalam penahanan polisi meninggal di bawah keadaan yang mencurigakan. Pada tanggal 31 Juli, di Poso, polisi menembak dan menciderai Bambang, seorang tersangka yang salah tuduh dalam pembunuhan bulan Juli terhadap Pendeta Susianti Tinulele. Polisi menyatakan bahwa Bambang mencoba untuk melarikan diri, tetapi para tetangga mengatakan bahwa dia ditembak tanpa alasan. Pada tanggal 29 Agustus, di Sragen, Jawa Tengah, polisi menembak dan menewaskan tiga tersangka yang mereka nyatakan berusaha melarikan diri dari tahanan polisi. Pada tanggal 30 Agustus, di Pekan Baru, polisi menembak dan menewaskan tersangka kriminal Hermansyah dan Ade Candra, yang keduanya diduga berusaha untuk melarikan diri saat polisi meminta untuk mengetahui tempat persembunyian teman-teman mereka.

Selama tahun ini, pemerintah tidak mencapai kemajuan yang signifikan dalam membuat pertanggung jawaban terhadap perlakuan kejam dalam tahun 2003, termasuk pembakaran yang fatal oleh polisi terhadap tersangka pencurian Arnoldus Adu di Rote, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pemukulan sampai mati terhadap seorang penduduk Jawa Timur oleh polisi dalam bulan Juni, dan dugaan bunuh diri oleh Ihwanuddin, tersangka anggota organisasi teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Pemerintah tidak melakukan kemajuan yang signifikan selama tahun ini dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tahun 1998 terhadap empat mahasiswa di Universitas Trisaksi dan sembilan demonstran di Jembatan Semanggi, dan pembunuhan tahun 1999 terhadap empat orang demonstran lagi di Semanggi. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM, meminta DPR untuk merubah kembali keputusannya dalam tahun 2001 yang tidak menggolongkan kasus-kasus tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi pada akhir tahun, DPR tidak memberikan tanggapan. Dalam bulan Juni 2003, sidang

pengadilan militer dimulai terhadap sorang tamtama, yaitu satu dari tiga prajurit TNI yang dituduh atas pembunuhan yang sembrono berkaitan dengan insiden Semanggi tahun 1999. Prajurit tersebut dituduh menembak dan menewaskan mahasiswa Yap Yun Hap tanpa perintah dari atasannya. Dua orang tertuduh lainnya, yang merupakan perwira, akan diadili secara terpisah. Pada akhir tahun semua kasus tertunda di Kejaksaan Agung, menunggu suatu keputusan dari DPR.

Selama tahun ini, bom meledak di atau di dekat kota-kota antara lain Jakarta, Ambon, Peureulak, dan Poso. Pada tanggal 10 Januari para anggota dari laskar Jundullah, suatu organisasi ekstremis yang berbasis di Sulawesi, megebom sebuah tempat minum di Palopo, Sulawesi Selatan, dan membunuh empat orang. Polisi menahan paling sedikit delapan tersangka, termasuk Agung Abdul Hamid, yang diduga sebagai dalang, yang sidang pengadilannya dimulai pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal 9 September, para tersangka anggota JI meledakkan sebuah bom berkekuatan besar di depan Kedutaan Australia di Jakarta, dan menewaskan 10 orang serta mencederai lebih dari 150 orang lain. Pada akhir tahun, Pemerintah telah menahan paling sedikit 15 orang yang berkaitan dengan penyerangan tersebut, termasuk tersangka dalang Iwan Darmawan, yang juga dikenal sebagai Rois.

Pemerintah membuat kemajuan besar dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pengeboman yang dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya. Pihak yang berwenang mengidentifikasi, menahan, dan secara berhasil menuntut banyak dari mereka yang terlibat dalam pengeboman bulan Agustus 2003 terhadap Hotel J.W. Marriott di Jakarta, yang menewaskan 12 orang, serta pengeboman di Bali tahun 2002, yang menewaskan 202 orang. Persidangan-persidangan tersebut dijadwalkan akan dimulai awal tahun 2005. Secara keseluruhan para penyidik polisi telah menahan lebih dari 130 tersangka yang berkaitan dengan JI sejak tahun 2002. Pada akhir tahun, pengadilan di Denpasar, Bali; Palu, Sulawesi Tengah; Lamongan, Jawa Timur; dan Jakarta telah menghukum sekitar 80 orang sehubungan dengan serangkaian penyerangan teror sejak tahun 2001. Menyusul pengeboman tahun 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar menghukum 18 tersangka dan membebaskan yang lain. Dalam bulan Oktober polisi menangkap Agung Abdul Hamid, tersangka dalang di balik pengeboman Makassar dan pengeboman 10 Januari di Sulawesi Selatan.

Massa melakukan main hakim sendiri dalam banyak kejadian, tetapi statistik yang dapat diandalkan tentang prevalensinya tidak tersedia. Insiden pencurian atau dugaan pencurian telah memicu banyak insiden tersebut. Misalnya, pada tanggal 16 Agustus di Bogor, Jawa Barat, massa menyerang dan menewaskan Ilham Kurniawan karena mencuri sebuah sepeda motor. Pada tanggal 21 Agustus di Palembang, Sumatera Selatan, massa keliru menganggap seorang laki-laki bernama Junaedi sebagai seorang pencuri dan memukulnya sampai mati. Tidak ada tindakan resmi yang diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan tersebut.

Polisi dan prajurit bentrok di sejumlah kejadian selama tahun ini. Pada tanggal 22 Maret, lebih dari 100 prajurit TNI dari Batalyon 143 di Lampung Selatan menyerang sebuah pos polisi di terminal bis Rajabasa. Bentrokan tersebut berasal dari suatu perselisihan pribadi, dan komandan militer regional Mayor Jenderal Syahril BP Peliung kemudian meminta maaf kepada polisi dan berjanji untuk mengambil tindakan disipliner terhadap para prajurit yang terlibat. Pada akhir tahun, penyelidikan dilakukan terhadap empat tamtama atas insiden tersebut. Pada tanggal 25 Nopember, para anggota TNI membunuh seorang petugas polisi dan mencederai berat tiga yang lain saat mereka menyerang sebuah pos polisi di Aceh Timur, sehubungan dengan sebuah perselisihan yang melibatkan kepentingan bisnis kelapa sawit. Dua puluh lima prajurit TNI ditahan atas partisipasi mereka di dalam penyerangan tersebut.

Di sekolah, universitas, pusat pelatihan polisi, dan lembaga lain, para siswa senior, atau para atasan kadang-kadang menganiaya secara fisik para siswa junior atau bawahan, melanjutkan suatu praktek yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Selama tahun ini, sejumlah insiden tersebut mengakibatkan kematian. Pada tanggal 23 Pebruari, polisi di Bandung, Jawa Barat menyatakan dua belas mahasiswa dari Institut Islam Negara, Sunan Gunung Djati sebagai tersangka atas kematian rekan mahasiswa Imam Nawawi, yang meninggal selama suatu kegiatan ekstra kurikuler seminggu sebelumnya. Delapan orang dituduh memukul Nawawi sampai mati. Dilaporkan bahwa otoritas polisi tidak melakukan tindakan lanjutan terhadap kematian lima calon polisi pada September 2003 di Palu, Sulawesi Tengah, yang menjadi korban perploncoan oleh anggota Brimob. Dalam bulan September 2003, di Sumedang, Jawa Barat, para siswa senior di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang dikelola pemerintah, dituduh mencekik Wahyu Hidayat, seorang mahasiswa tingkat 2. Seorang mahasiswa STPDN mengatakan bahwa para siswa senior tersebut memukul Wahyu untuk

memberinya pelajaran dalam loyalitas setelah dia tidak hadir pada suatu upacara penaikan bendera pada Hari Kemerdekaan. Pada tanggal 15 April, sepuluh mahasiswa diadili dan dihukum 7 sampai 10 bulan penjara berkaitan dengan kematian tersebut. Para jaksa penuntut telah menuntut 5 tahun penjara bagi para tertuduh (lihat Bagian 1.c.).

b. Penghilangan Paksa

Selama tahun ini terjadi lusinan peristiwa penghilangan orang, paling sering di Propinsi Aceh, dan orang-orang dalam jumlah besar yang hilang selama dua puluh tahun terakhir, terutama di daerah-daerah konflik, tetap tidak dipertanggung jawabkan. Dilaporkan bahwa Pemerintah melakukan hanya sedikit kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap peristiwa penghilangan tersebut yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut suatu koalisi LSM hak asasi manusia, 46 warga sipil dan 4 anggota GAM telah menjadi korban penculikan sampai dengan bulan Nopember; organisasi yang sama tersebut melaporkan 130 warga sipil dan 3 anggota GAM sebagai korban penculikan dalam tahun 2003.

Satuan keamanan dikaitkan dengan beberapa peristiwa penghilangan tersebut. Sebuah laporan dari seorang saksi mata kepada AI menyatakan bahwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang bekerja di sebuah sawah telah ditembak pergelangan kakinya saat dia berusaha untuk melarikan diri dari seorang prajurit. Anak laki-laki tersebut kemudian ditangkap, dan keberadaannya tidak diketahui pada akhir tahun. Pemerintah tidak melakukan kemajuan yang signifikan untuk memastikan keberadaan dari mereka yang hilang dalam tahun 2003, termasuk Mukhlis dan Zulfikar, anggota dari Link for Community Development, sebuah LSM setempat, setelah intelijen militer berpakaian preman menahannya di kota Bireuen.

GAM juga menculik orang selama tahun ini. Guru sekolah dasar Muhammad Amin Alwi dan Hasballah secara paksa diambil oleh 10 orang bersenjata berseragam militer di Kabupaten Nagan Raya. TNI yakin bahwa orang-orang tersebut adalah anggota GAM, karena para siswa melaporkan bahwa para penculik menggunakan suatu dialek Aceh dan mengeluh bahwa sekolah tersebut tidak membantu perjuangan mereka sejak darurat militer diberlakukan. Dalam bulan Juni 2003, di daerah Peureulak, Aceh Timur, wartawan Ersas Siregar dari Rajawali Citra Televisi, juru kamera Fery Santoro, pengemudi Rahmatsyah, dan istri dua perwira TNI, disandera oleh GAM. Salah seorang istri, Cut Soraya, sedang hamil. Ersas Siregar tewas dalam bulan Desember 2003 selama suatu kontak senjata antara GAM dan marinir. Setelah negosiasi yang panjang antara GAM dan International Committee of the Red Cross (ICRC), Fery Santoro telah dibebaskan dalam bulan Mei bersama 150 sandera warga sipil yang lain, termasuk kedua istri dari perwira TNI tadi. Soraya melaporkan bahwa ia dipukul oleh mereka yang menangkapnya dan akhirnya keuguran.

Di Papua tidak ada laporan yang kredibel tentang peristiwa penghilangan orang. Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa penghilangan yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya, termasuk dari Martinus Maware, Mathius Rumbapak, atau Hubertus Wresman.

Di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara, tidak ada laporan yang kredibel tentang peristiwa penghilangan orang selama tahun ini. Pemerintah membuat sedikit kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa penghilangan yang terjadi di Sulawesi Tengah dalam tahun 2002. Selama tahun ini, 14 prajurit telah dihadapkan ke mahkamah militer dan menerima hukuman yang berkisar antara pemecatan dengan tidak hormat dan 4 tahun penjara atas penculikan dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan di kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam bulan Desember 2002. TNI menuduh 2 orang letnan dan 12 tamtama atas penculikan terhadap lusinan warga sipil di daerah Toyado tetapi menolak untuk mengumumkan nama-nama mereka. Para prajurit tersebut dituduh menculik warga sipil dalam bulan Desember 2002, setelah salah seorang komandan mereka ditembak di kepalanya selama suatu bentrokan antara orang Kristen dan Muslim di daerah Sepe. Beberapa warga sipil yang diculik ditemukan tewas sementara yang lain masih tetap hilang sampai dengan akhir tahun.

Pemerintah tidak membuat kemajuan baru dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap penyerangan tahun 1996 oleh ratusan warga sipil pro-pemerintah dan prajurit terhadap markas besar dari apa yang pada saat itu disebut Partai Demokrasi Indonesia (PDI); 5 orang tewas dan 23 orang hilang dalam penyerangan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuduh lima orang, tiga diantara mereka adalah warga sipil atas perusakan dan penyerangan selama peristiwa tersebut: Kolonel Purnawirawan Budi Purnawa,

Letnan Soeharto, Mochammad Tanjung, Jonathan Marpaung, dan Rahimmi Ilyas. Namun, Petrus Kurniawan, seorang tokoh utama dari sebuah kelompok yang mendesak pertanggung jawaban, menyebutkan persidangan tersebut sebagai suatu "sandiwara", dengan mengatakan bahwa para terdakwa tersebut adalah operator lapangan dan bukan para pemimpin di balik penyerangan. Selama tahun ini, para penyidik polisi kembali menyerahkan kepada jaksa penuntut umum enam berkas dari kasus tersebut, tetapi jaksa penuntut umum mengembalikan arsip kasus tersebut kepada polisi, dengan mengatakan bahwa arsip tersebut tidak lengkap. Di dalam berkas tersebut terdapat nama-nama dari Gubernur Jakarta Sutiyoso, yang dalam tahun 1996 menjabat sebagai komandan militer Jakarta; mantan Kepala Intelijen Negara Zacky Anwar Makarim; Brigadir Jenderal Syamsiar Wangsamihardja; mantan Kepala Polisi Jakarta Hamami Nata; petugas polisi Jakarta Pusat Abubakar Nataprawira, Kolonel Haryanto; dan mantan Ketua PDI Soerjadi.

c. Penyiksaan dan Hukuman atau Perlakuan Kejam Lain Yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum sampai 4 tahun penjara bagi petugas yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memperoleh suatu pengakuan; namun, para petugas penegakan hukum secara luas mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktek. Satuan keamanan terus menggunakan penyiksaan dan bentuk perlakuan kejam lainnya. Pemerintah melakukan hanya sedikit usaha untuk meminta pertanggung jawaban dari para anggota satuan keamanan atas tindakan penyiksaan. Selama tahun ini penggunaan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka paling tampak jelas di Aceh.

Penyiksaan kadang-kadang digunakan untuk memperoleh pengakuan, menghukum tersangka dan mencari informasi tentang orang lain yang terlibat di dalam kegiatan kriminal. Satuan keamanan juga diduga menggunakan penyiksaan untuk memeras uang dari penduduk desa. Angka-angka yang dapat diandalkan tentang jumlah insiden penyiksaan yang terjadi selama tahun ini sulit untuk diperoleh. Kasus penyiksaan fisik termasuk pemukulan membabi buta dan tindakan yang melibatkan rambut, kuku, gigi, dan alat kelamin. Panas, pengurangan nafas, listrik dan digantung pada kaki juga digunakan. Dilaporkan bahwa kasus penyiksaan fisik termasuk tidak diperbolehkan makan dan tidur, pelecehan seksual, dan pemberian kesaksian secara paksa atau berpartisipasi dalam tindakan penyiksaan.

Selama tahun ini, pembatasan pers di Propinsi Aceh telah membatasi laporan media tentang kasus penyiksaan di daerah tersebut. Namun, suatu koalisi LSM hak asasi manusia melaporkan kasus penyiksaan terhadap 77 warga sipil dan 7 anggota GAM, dibandingkan dengan 256 warga sipil dan 16 anggota GAM yang disiksa dalam tahun 2003. LSM Kontras melaporkan bahwa 214 warga sipil telah disiksa. Dalam bulan September, Human Rights Watch (HRW) melaporkan penyiksaan secara luas terhadap tahanan penjara di Aceh oleh satuan keamanan. HRW melaporkan bahwa 24 dari 35 tahanan penjara orang Aceh yang diwawancarai, menyatakan bahwa mereka telah disiksa dan dipaksa untuk mengakui keterlibatan dengan GAM. Contoh penyiksaan di dalam laporan termasuk kejutan listrik dan pemukulan dengan balok kayu serta ujung pistol. Pemerintah mengumumkan akan menginvestigasi dugaan yang terkandung di dalam laporan HRW tersebut. AI melaporkan bahwa dalam bulan Januari, para anggota Brimob menahan seorang pemilik toko kecil yang diduga sebagai seorang perwira intelijen GAM. Ia ditahan selama 24 jam, dan selama itu diduga bahwa para anggota Brimob memukulnya di wajah dengan ujung senapan dan mematahkan hidungnya. Juga diduga bahwa dia disundut dengan rokok di lengannya, perut, dan paha. Wakil dari AI melaporkan telah melihat lusinan tanda bakar yang masih kelihatan saat mereka menemuinya dalam bulan Mei. Ia dibebaskan dan meninggalkan daerah tersebut setelah desanya membayar US\$ 22 (Rp. 198.000) kepada Brimob.

Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas tindakan penyiksaan yang dilakukan di Aceh dalam tahun 2002 atau 2003, termasuk pemukulan dan pembakaran terhadap warga sipil Rizki Muhammad.

Dalam bulan Nopember 2003, di Wamena, sebuah kota Papua, tersangka Jigibalon dan Tenius Murib telah ditahan karena telah mencuri senjata dari sebuah gudang senjata militer. Keduanya sakit tapi ditolak untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Juga di Wamena, orang-orang bersenjata yang tidak teridentifikasi menyerang sebuah gudang senjata pemerintah dalam bulan April 2003. Para pejabat TNI menahan tersangka Yapenas Murib untuk menyainya, yang kemudian meninggal dalam tahanan TNI. (lihat Bagian 1.a.). Pemerintah tidak menyelidiki kematiannya. Komnas HAM menyelesaikan suatu investigasi di dalam laporan bahwa lusinan penduduk dari daerah Dataran Tinggi Kuyowage telah disiksa oleh pihak-pihak yang tidak

dikenal selama suatu operasi militer menyusul pembongkaran gudang senjata di Wamena. Komnas HAM menyimpulkan bahwa satuan militer menyiksa penduduk desa dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat yang lainnya. Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut atau tindakan penyiksaan lain yang dilakukan di Papua dalam tahun 2003 atau 2002, termasuk penyiksaan terhadap Yanuarius Usi sampai mati.

Awal bulan Agustus, tersangka anggota JI Saifudin Umar, alias Abu Fida, ditemukan dalam keadaan cedera berat di sebuah rumah sakit Jawa Timur. Ia menyatakan telah ditahan secara diam-diam dan disiksa oleh polisi. Polisi mengakui telah menahan Abu Fida atas dasar bahwa dia telah membantu menyembunyikan dua pelarian JI; namun, polisi menolak telah menyiksanya. Pemerintah melakukan kemajuan dalam menahan dan menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus penyiksaan di Jawa Timur. Pada tanggal 19 Januari, 3 petugas polisi ditangkap dengan tuduhan menyiksa dua mahasiswa di Surabaya. Pada tanggal 6 September Pengadilan Negeri Padang di Sumatera Barat menyatakan bersalah dan menghukum 16 bulan penjara kepada 5 petugas polisi yang dituduh menyiksa tersangka kasus narkotik Faisal sampai mati.

Perkosaan terjadi di wilayah-wilayah konflik (lihat Bagian 5). Para pembela hak asasi manusia menyalahkan prajurit dan polisi terhadap banyak kasus perkosaan itu. Tidak tersedia statistik, tetapi sumber-sumber yang kredibel memberikan sejumlah laporan yang melibatkan prajurit dan polisi. Kontras melaporkan bahwa selama keadaan darurat perang di Aceh, 47 perempuan dan 29 anak-anak menjadi korban kekerasan, termasuk perkosaan. Luasnya masalah yang menyangkut perkosaan di Aceh sulit untuk dinilai, disebabkan oleh stigma sosial, kurangnya pelaporan, dan akses ke wilayah tersebut. Sentral Informasi Untuk Referendum Aceh (SIRA) melaporkan 9 kasus perkosaan oleh personil militer di Aceh. LSM Aceh Sehabat mengkonfirmasi suatu laporan bahwa pada tanggal 24 Juli, tiga prajurit TNI memperkosa seorang anak perempuan umur 16 tahun di Kampung Meureu Baro-Indrapuri selama suatu jangka waktu beberapa bulan dan meninggalkannya dalam keadaan hamil. Keluarga dan teman-teman melaporkan bahwa mereka mengetahui anak perempuan tersebut diperkosa tetapi tidak melakukan sesuatu untuk menghentikannya karena takut terhadap keselamatan mereka.

Di sekolah, universitas, pusat pelatihan polisi, dan lembaga lain, para senior atau atasan kadang-kadang menganiaya para junior atau bawahan secara fisik, suatu praktek yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Selama periode ini, sejumlah insiden tersebut mengakibatkan kematian (lihat Bagian 1.a.).

Pemerintah gagal membuat kemajuan dalam mempertanggung jawabkan kerusakan tahun 1998, yang mencakup tindakan penyiksaan dan penyerangan lain terhadap perempuan etnik Cina di Jakarta, Solo, Medan, dan kota-kota lain. Dalam tahun 2003 suatu tim investigasi dari Komnas HAM menyelidiki insiden tersebut, menerima kesaksian dari lusinan saksi, dan mengidentifikasi 20 tersangka. Namun, pada akhir penyelidikan, pemimpin tim Solahuddin Wahid, menolak untuk mengumumkan nama-nama tersangka, yang beberapa diantaranya adalah anggota polisi dan militer. Tim tersebut memanggil 86 warga sipil, sebagian besar merupakan saksi untuk memberikan kesaksian; semuanya kecuali 5 orang tidak datang. Tim tersebut juga memanggil 48 pejabat pemerintah, militer dan polisi, dan hanya 3 yang datang. Di antara mereka yang tidak datang adalah mantan komandan Angkatan Bersenjata Wiranto, juru bicara TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, dan mantan komandan Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Komnas HAM membuat suatu laporan 1.500 halaman tentang kerusakan tersebut dan dalam bulan September 2003 meneruskan laporan tersebut kepada Kejaksaan Agung, dengan harapan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan suatu investigasinya sendiri. Namun, pada tanggal 4 Maret, Kejaksaan Agung mengembalikan laporan tersebut kepada Komnas HAM, karena laporan tersebut kurang kesaksian dari anggota-anggota penting satuan keamanan.

Di Propinsi Aceh, menyusul diberlakukannya darurat militer dalam bulan Mei 2003, lebih dari 603 gedung sekolah, sebagian besar sekolah dasar, telah dibakar. Pemerintah menghubungkan penyerangan pembakaran tersebut dengan GAM, yang memiliki suatu sejarah untuk menghancurkan gedung-gedung umum, termasuk sekolah, karena gedung-gedung tersebut merupakan simbol yang paling nyata dari kehadiran pemerintah dan juga karena satuan keamanan sering menggunakan fasilitas pemerintah yang ditinggalkan sebagai barak atau markas besar desa. GAM menolak tuduhan tersebut. Pada akhir tahun, pemerintah telah membangun kembali 328 sekolah, tetapi dilaporkan bahwa beberapa ratus sekolah telah dihancurkan oleh tsunami pada tanggal 26 Desember. Kelompok hak asasi manusia di Aceh melaporkan bahwa satuan keamanan melanjutkan praktek untuk menandai rumah-rumah keluarga yang dicurigai sebagai anggota GAM dengan suatu tanda merah "X" atau "GAM", dan dengan demikian memberi stigma kepada para penduduk tersebut dan dalam banyak hal menyebabkan pengasingan mereka.

Tidak ada kemajuan yang dibuat dalam penyelidikan terhadap dugaan pembakaran dengan tujuan balas dendam oleh Brimob terhadap 80 toko dan rumah di Keude Seuneddon, Aceh Utara, dalam suatu insiden tahun 2003 yang terjadi segera setelah pembunuhan 2 petugas Brimob.

Pada tanggal 28 September, kira-kira 150 anggota Forum Betawi Rempug (FBR), suatu kelompok para kriminal yang menyatakan diri mereka sebagai penduduk asli, menyerang sejumlah tempat hiburan malam di daerah Cilincing dan Muara Baru, Jakarta, dengan mengatakan bahwa bisnis tersebut tidak bermoral dan harus ditutup dalam waktu satu minggu. Dilaporkan bahwa para petugas polisi hanya berdiri mengawasi pada saat para anggota FBR menteror tempat-tempat hiburan malam tersebut. Ini merupakan penyerangan besar pertama dari FBR sejak penyerangan tahun 2002 terhadap para anggota dari Konsorsium Kaum Miskin Urban di Kantor Komnas HAM Jakarta. Pada tanggal 27 Juni orang-orang yang menyatakan diri sebagai anggota FBR juga memaksa penutupan sebuah gereja di Jakarta Timur (lihat Bagian 2.c.). Dalam bulan Oktober, yaitu bulan Ramadhan, kelompok FBR menyerang klub malam dan gedung-gedung lain yang mereka yakini dibuka tidak sebagaimana mestinya selama bulan suci tersebut. Delapan anggota FBR telah ditahan atas tindakan mereka. Beberapa ratus orang bersenjata tongkat dari Front Pembela Islam (FPI) menyerang suatu klub malam yang populer di Jakarta. Beberapa pejabat polisi dilaporkan menyetujui serangan tersebut, tetapi setelah para tokoh terkemuka mengkritik serangan tersebut, polisi menyebarkan lebih dari seribu petugas tambahan untuk melakukan patroli di jalan-jalan. Empat anggota FPI telah ditahan.

Kondisi di 365 penjara negara dan pusat penahanan adalah kejam, dan keadaan penuh sesak meluas. Fasilitas seringkali dipakai dua atau tiga kali melebihi kapasitas. Penjaga secara teratur menganiaya para penghuni penjara dan memeras uang dari mereka. Tahanan yang sulit dikendalikan ditahan dalam ruangan sempit tersendiri selama sampai 6 hari dengan hanya diberi nasi dan air. Tahanan yang kaya atau mempunyai hak istimewa memiliki akses ke perlakuan yang lebih baik di dalam penjara. Dalam bulan Juli, tahanan penjara yang paling terkenal di negara ini, yaitu Hutomo "Tommy Suharto" Mandala Putra, putra mantan Presiden Suharto, yang dihukum karena mendalangi pembunuhan terhadap seorang hakim, telah diterbangkan dengan sebuah helikopter untuk menginap di Suite Pavilyun Kartika yang mewah di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto selama 6 hari. Tommy Suharto tidak muncul pada 7 kali sidang pengadilan karena alasan kesehatan. Suatu tim yang terdiri atas 10 orang dokter mendeteksi suatu kemungkinan tumor di belakang mata kiri Tommy Suharto dan bisul di perut, tetapi akhirnya menyatakan ia mampu untuk melakukan kegiatan normal.

Otoritas penjara menahan penghuni penjara perempuan secara terpisah dari laki-laki tetapi dalam kondisi yang sama. Sebagian besar anak-anak yang dihukum karena kejahatan yang berat telah dikirim ke penjara anak. Namun, sebelum mereka dihukum, sebagian besar anak-anak nakal tersebut telah ditahan dengan orang dewasa di pusat penahanan. Dalam teori, penjara menahan mereka yang dihukum oleh pengadilan, sementara pusat penahanan menahan mereka yang menunggu persidangan; namun, dalam praktek, para tahanan pra-sidang sewaktu-waktu ditahan dengan tahanan penjara yang dihukum. Tidak ada pembatasan resmi terhadap kunjungan ke penjara oleh pemantau hak asasi manusia, dan petugas penjara memberikan berbagai tingkat akses. ICRC melakukan beberapa kunjungan ke para penghuni penjara selama tahun ini.

d. Penangkapan atau Penahanan Sewenang-wenang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi ketentuan-ketentuan tentang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, namun kitab tersebut kekurangan cukup mekanisme pelaksanaan, dan pihak yang berwenang secara terus menerus melanggarnya. Kitab Undang-Undang tersebut memberikan hak kepada para tawanan untuk secara cepat memberitahu keluarga mereka, dan menetapkan bahwa surat perintah harus diberikan pada suatu penangkapan. Pengecualian diizinkan bila, misalnya, seorang tersangka tertangkap dalam tindakan melakukan suatu kejahatan. Undang-Undang mengizinkan para penyidik untuk mengeluarkan surat perintah; namun, dari waktu ke waktu pihak yang berwenang melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Tidak ada statistik yang dapat diandalkan tentang berapa banyak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang terjadi pada tahun ini.

Presiden mengangkat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), berdasarkan konfirmasi DPR. Kapolri melapor kepada Presiden tetapi bukan merupakan anggota penuh dari kabinet. Polisi Republik Indonesia terdiri atas kira-kira 250.000 petugas yang disebarkan ke masing-masing 33 propinsi. Meskipun ada desentralisasi,

polisi sebagian besar mempertahankan hirarki sentralisasi mereka, dimana satuan polisi setempat melapor ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan tidak ke pemerintah daerah.

Selama tahun ini, polisi pada umumnya memperbaiki profesionalisme dan keefektifan mereka dalam memerangi kejahatan, dan mereka berhasil dalam menahan sejumlah besar tersangka dalam penyerangan teroris. Profesionalisme keseluruhan dari polisi tetap rendah, sebagaimana juga penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan keefektifan dalam menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bebas dari hukuman dan korupsi tetap merupakan masalah yang signifikan. Tingkat perbuatan salah di dalam satuan polisi negara sulit untuk diukur. Polisi biasanya meminta suap, mulai dari pembayaran kecil dalam kasus lalu lintas sampai kepada penyuapan yang besar dalam penyelidikan kriminal. Menurut polisi, 36 anggota satuan polisi nasional telah diinvestigasi karena melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia selama tahun ini. Bentuk hukuman beraneka ragam, mulai dari penurunan pangkat sampai kepada tuntutan kriminal.

Seorang terdakwa dapat menolak keabsahan dari penangkapan dan penahanannya dalam suatu sidang pra-peradilan dan dapat menuntut ganti rugi bilamana salah tahan; namun, para terdakwa jarang menang dalam sidang pra-peradilan dan hampir tidak pernah menerima ganti rugi setelah dibebaskan tanpa tuntutan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima permohonan naik banding berdasarkan tuntutan atas penangkapan dan penahanan yang tidak sebagaimana mestinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membatasi jangka waktu dari penahanan pra-sidang. Polisi diizinkan untuk suatu penahanan awal 20-hari, yang dapat diperpanjang sampai 60-hari; jaksa penuntut dapat menahan seorang tersangka 30-hari awal, dengan diizinkan perpanjangan 20-hari. Jaksa penuntut dapat memperpanjang masa penahanan oleh polisi, dan suatu pengadilan negeri dapat memperpanjang penahanan oleh jaksa penuntut terhadap seorang tersangka. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat menahan seorang tersangka sampai 90 hari selama persidangan atau permohonan banding, sementara Mahkamah Agung dapat menahan tersangka selama 110 hari sambil mempertimbangkan suatu permohonan banding. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengizinkan masa penahanan diperpanjang sampai 60 hari tambahan pada setiap tingkat bilamana seorang tersangka menghadapi suatu kemungkinan putusan penjara selama 9 tahun atau lebih, atau individu tersebut dinyatakan terganggu secara mental atau fisik. Pihak yang berwenang pada umumnya menghormati batasan-batasan tersebut dalam praktek.

Di daerah-daerah konflik separatistis, seperti Aceh dan Papua, polisi seringkali dan secara sewenang-wenang menahan orang tanpa surat perintah, tuduhan, atau proses pengadilan. Kontras melaporkan bahwa di Aceh penahanan tersebut seringkali terjadi karena dugaan dukungan terhadap anggota GAM. Menurut HRW, 60 persen dari penahanan tahun 2003 dilakukan tanpa surat perintah. Di samping itu, 35 tahanan di Aceh yang di wawancara HRW selama tahun ini melaporkan bahwa mereka tidak diperlihatkan suatu surat perintah penahanan pada saat mereka ditahan dalam tahun 2003. Pihak berwenang jarang memberikan jaminan. Pihak yang berwenang seringkali mencegah akses ke pembela selama investigasi dan membatasi atau mencegah akses ke bantuan hukum dari organisasi pembela hukum sukarela. Paling tidak satu orang meninggal dalam tahanan selama tahun ini.

Keputusan 2002 tentang terorisme dan undang-undang anti-teroris bulan Maret 2003 mengizinkan penggunaan barang bukti di dalam persidangan seperti alat penyadap, rekaman video serta alat pengamatan lainnya. Pemerintah menerapkan undang-undang ini dalam kasus-kasus dari paling sedikit lima orang individu yang terkait dengan GAM. Mereka mengikutsertakan para mantan juru runding Teuku Kamaruzzaman, Teuku Hamad Usman, Amni bin Ahmad Marzuki, Sofyan Ibrahim Tiba, dan Nasiruddin bin Achmed. Dalam bulan Oktober 2003 Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum kelima orang tersebut atas tindakan terorisme dan menghukum mereka antara 12 sampai 15 tahun penjara. Pada tanggal 1 Juni, Mahkamah Agung menolak permohonan banding mereka.

Tidak ada laporan tentang tahanan politik selama tahun ini.

e. Tidak Adanya Persidangan Publik Yang Adil

Undang-Undang Dasar menetapkan kebebasan peradilan. Dalam praktek, badan yudikatif menjadi semakin independen tetapi sewaktu-waktu tetap sangat dipengaruhi oleh badan eksekutif. Peradilan juga terus dipengaruhi oleh militer, kepentingan bisnis dan para politikus. Pada tanggal 1 April, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, Departemen Kehakiman mengalihkan pengawasan administratif dan keuangan atas peradilan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi yang baru memperlihatkan kebebasan yang

signifikan dan, dalam beberapa kasus besar, keputusannya melawan pemerintah. Sebelumnya, para hakim adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh badan eksekutif, yang mengontrol penugasan, gaji, dan promosi mereka. Gaji yang rendah terus mendorong korupsi, dan para hakim tunduk kepada tekanan dari otoritas pemerintah, yang sering mempengaruhi hasil dari kasus. Dalam bulan Agustus, TNI mengalihkan pengawasan administratif terhadap pengadilan militer kepada Mahkamah Agung.

Di bawah Mahkamah Agung terdapat suatu badan kehakiman kuadripartit yang terdiri atas pengadilan umum, agama, militer, dan administratif. Undang-undang menetapkan hak untuk naik banding, secara berurutan dari suatu pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, dan terus ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan aspek-aspek faktual dari suatu kasus tetapi lebih mempertimbangkan penerapan undang-undang oleh pengadilan yang lebih rendah. Sejalan dengan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi, yang diberdayakan untuk meninjau kualitas konstitusional dari undang-undang, menyelesaikan perselisihan antara lembaga-lembaga negara, membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan pemilihan, dan memutuskan dugaan pengkhianatan atau korupsi terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Badan yudikatif secara teori adalah setingkat dengan badan eksekutif dan legislatif, dan memiliki kekuasaan peninjauan yudikatif terhadap undang-undang yang disahkan oleh DPR; Peraturan Pemerintah; serta Keputusan Presiden, Menteri, dan Gubernur. Dalam praktek, badan yudikatif kurang berpengaruh dibandingkan badan eksekutif dan legislatif, dan sering sangat dipengaruhi oleh badan eksekutif.

Pada 2.418 Pengadilan Negeri negara ini, suatu panel hakim melakukan persidangan dengan mengajukan pertanyaan, meminta barang bukti, memutuskan bersalah atau tidak bersalah, dan menilai hukuman. Para hakim jarang mengembalikan keputusan awal di dalam proses naik banding, walaupun kadang-kadang mereka memperpanjang atau memperpendek keputusan hukuman. Pembela dan penuntut dapat mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan.

Undang-undang menganggap bahwa terdakwa tidak bersalah sampai mereka telah dibuktikan bersalah. Undang-undang tersebut juga mengizinkan jaminan, yang digunakan di dalam praktek tetapi jarang di daerah-daerah konflik separatistis. Para petugas pengadilan kadang-kadang menerima suap sebagai ganti untuk memberikan jaminan. Terdakwa mempunyai hak untuk menghadapkan saksi dan memanggil saksi di dalam pembelaan mereka. Suatu pengecualian diizinkan dalam kasus di mana jarak atau biaya dianggap terlalu tinggi untuk mendatangkan saksi ke pengadilan; dalam hal tersebut pernyataan tertulis yang tersumpah dapat digunakan. Pengadilan mengizinkan pengakuan yang dipaksa, khususnya di daerah-daerah konflik dan membatasi penyerahan barang bukti pembelaan. Terdakwa juga memiliki hak untuk menghindari penuduhan terhadap dirinya tetapi pada umumnya diharuskan untuk memberikan kesaksian sebelum penutupan suatu sidang. Namun, dalam praktek, terdakwa biasanya menolak untuk menjawab pertanyaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan terdakwa hak untuk mendapatkan seorang pengacara mulai dari saat ditahan dan pada setiap tahap pemeriksaan. Undang-undang mewajibkan agar pengacara ditunjuk dalam kasus yang melibatkan hukuman yang besar atau keputusan penjara selama 15 tahun atau lebih. Dalam kasus yang melibatkan keputusan potensial selama 5 tahun atau lebih, maka undang-undang mewajibkan penunjukan seorang pengacara bila terdakwa tidak mampu dan bila terdakwa meminta seorang pengacara. Dalam teori, terdakwa yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum swasta, tetapi dalam praktek, hanya sedikit yang benar-benar memperoleh pelayanan seorang pengacara. Dalam banyak hal, pihak yang berwenang secara diam-diam membujuk terdakwa untuk tidak menyewa seorang pengacara. Dalam banyak hal, pembelaan prosedural, termasuk pengakuan secara paksa, tidak cukup untuk menjamin suatu pengadilan yang jujur.

Korupsi yang luas terus berlanjut di seluruh sistem hukum. Dalam bulan Oktober 2003, Bank Dunia melaporkan bahwa suatu wabah korupsi telah membahayakan hukum dan ketertiban. Suap mempengaruhi penuntutan, penghukuman, dan pemberian keputusan pada kasus-kasus perdata dan kriminal yang tidak terhitung. Sebagian besar hakim mempunyai penghasilan US\$ 200 sampai US\$ 225 (Rp. 1,8 juta sampai Rp. 2,03 juta) per bulan, sementara seorang hakim dengan pengalaman 3 dekade mempunyai penghasilan kira-kira US\$ 660 (Rp. 5,94 juta) per bulan. Para individu utama di dalam sistem peradilan tidak hanya menerima suap tetapi tampaknya menutup mata terhadap kantor-kantor pemerintah yang dicurigai melakukan korupsi. Selama tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara dengan "ketidakberesan" yang paling banyak dalam penggunaan dana negara. Dalam tahun 2003, BPK berulang kali menuduh Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsi yang telah diajukan kepada mereka, dengan menyatakan bahwa, sejak tahun 2001, BPK telah melaporkan 6.162 kasus tentang dugaan

korupsi ke Kejaksaan Agung dan polisi, tetapi bahwa hanya 505 kasus – kira-kira 8 persen – telah diinvestigasi oleh kedua kantor tersebut.

Dalam bulan Agustus 2003, jurnal peninjauan hukum menginvestigasi pembelian keputusan pengadilan dalam perkara perdata korporat di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari memo korporat yang bocor dan sumber-sumber lain, maka peninjauan hukum mempublikasikan suatu daftar yang memperkirakan “harga untuk kemenangan” dalam suatu kasus pengadilan mulai dari US\$ 8.300 (Rp. 74,7 juta) di Pengadilan Negeri Bandung sampai US\$ 600.000 (Rp. 54 milyar) di Mahkamah Agung.

Terlepas dari sejumlah kecil prajurit yang diadili di pengadilan Hak Asasi Manusia, ratusan prajurit tingkat-rendah dan kadang-kadang tingkat-menengah diadili di Pengadilan Militer, bahkan untuk pelanggaran yang melibatkan warga sipil atau yang terjadi saat para prajurit tersebut sedang tidak bertugas. Bilamana seorang prajurit dicurigai melakukan suatu tindak kejahatan, maka polisi militer menyelidiki dan meneruskan penemuan mereka kepada jaksa militer, yang memutuskan apakah akan membuat suatu kasus atau tidak. Jaksa militer, sebagaimana juga hakim militer, dikelola secara administratif oleh TNI tetapi bertanggung jawab kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam penerapan undang-undang. Namun, di bawah “sistem satu atap” yang diadopsi oleh badan yudikatif selama tahun ini, pengawasan administratif terhadap pengadilan militer dan agama dijadwalkan untuk dialihkan secara bertahap kepada Mahkamah Agung. Persidangan dilakukan di depan suatu panel yang terdiri dari tiga-orang hakim militer. Permohonan banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi Militer; dan permohonan banding tersebut dapat mempertanyakan hal-hal tentang fakta atau undang-undang. Suatu Mahkamah Agung Militer mendasarkan pemberian keputusannya hanya kepada aplikasi atau interpretasi undang-undang. Beberapa warga sipil mengeluh mengenai singkatnya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer. Para pejabat hukum TNI menjawab bahwa semua pasukan yang mendapat hukuman selama jangkawaktu 3 bulan atau lebih, telah dipecat dari Angkatan Bersenjata, terlepas dari catatan atau jangka waktu pengabdianya dan menyatakan bahwa ini merupakan suatu hukuman yang signifikan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang besar dapat diputuskan oleh empat Pengadilan Negeri. Undang-undang menetapkan agar setiap pengadilan mempunyai lima anggota termasuk tiga hakim non-karir, yang diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. Keputusan pengadilan dapat dimohon banding kepada pengadilan tinggi yang tepat dan Mahkamah Agung. Undang-undang menetapkan definisi pemusnahan etnik yang diakui secara internasional, tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando, tetapi tidak memasukkan tindakan kejahatan perang sebagai suatu pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam bulan Agustus 2003, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk Timor Timur mengakhiri tahap persidangannya di Jakarta dengan penghukuman Mayor Jenderal Adam Damiri atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Damiri, yang tetap bebas berdasarkan permohonan banding, menjadi yang ke 6 dari 18 terdakwa yang dihukum sehubungan dengan kekejaman yang terjadi selama bulan April 1999 sampai September 1999 di 3 lokasi Timor Timur: Liquica, Dili dan Suai. Pada tanggal 29 Juli, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak hukuman terhadap Damiri, Noer Muis, Hulman Goeltom dan Sudjarwo. Pengadilan ini kemudian membebaskan dan melepaskan Abilio Jose Soares, yang merupakan satu-satunya terdakwa yang telah menjalani hukuman penjara. Keputusan hukuman terhadap Eurico Guterres telah dikurangi berdasarkan permohonan banding, dari 10 tahun menjadi 5 tahun penjara. Dia naik banding untuk kasus tersebut ke Mahkamah Agung dan, pada akhir tahun tetap bebas. Kemudian, Kejaksaan Agung naik banding ke Mahkamah Agung untuk meninjau keputusan pengadilan Jakarta untuk menolak hukuman kepada Noer Muis, Hilman Goeltom, Sudjarwo dan Guterres. Kejaksaan Agung juga naik banding ke Mahkamah Agung agar meninjau keputusan Pengadilan Negeri untuk membebaskan Tono Suratman. Kelima kasus berada dalam peninjauan pada akhir tahun. Unit Kejahatan Berat Timor Timur menuntut sejumlah 391 individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama dan setelah referendum 1999; namun, 290 dari individu tersebut tetap bebas dengan sedikit kemungkinan dikembalikan ke Timor Timur untuk menghadapi persidangan. PBB menyatakan maksudnya untuk mengirim suatu Komisi Ahli agar mengevaluasi Pengadilan Ad Hoc dan unit kejahatan berat dan untuk merekomendasi langkah-langkah selanjutnya agar mencapai pertanggung jawaban. Sebagai suatu kemungkinan alternatif, yaitu suatu Komisi Ahli, maka pemerintah Indonesia dan Timor Timur sepakat dalam bulan Desember membentuk suatu Komisi Kebenaran dan Persahabatan untuk menangani pertanggung jawaban.

Dalam tahun 2003, pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk insiden Tanjung Priok 1984, dimana lusinan dan mungkin ratusan orang ditembak dan dibunuh, menyelenggarakan seksi-seksi pengadilannya yang pertama di Jakarta. Panel yang terdiri dari 5 hakim mengadili kasus dari 16 terdakwa, termasuk Mayor Jenderal Purnawirawan Pranowo; Mayor Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat Rudolf Butar-Butar; Mayor Jenderal Angkatan Darat Sriyanto Mutrasan, Komandan Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus); dan para purnawirawan perwira militer berpangkat tinggi atau yang masih aktif. Semua terdakwa menghadapi tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan menghukum Butar-Butar 10 tahun penjara dan menetapkan 13 yang lain sebagai bersalah serta menghukum mereka 2 sampai 3 tahun penjara, jauh di bawah hukuman 10 tahun yang diminta oleh Jaksa penuntut. Pada akhir tahun, seluruh 14 orang yang terhakum tetap bebas karena pengadilan tinggi mempertimbangkan permohonan banding mereka. Beberapa korban Tanjung Priok melaporkan bahwa mereka telah menerima ancaman mati dari prajurit di gedung pengadilan. Beberapa anggota dari tim pembela menentang karena tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak diterapkan retroaktif secara adil kepada klien mereka. Pengadilan tersebut mendapatkan perhatian dalam negeri yang besar sebagai pengadilan Hak Asasi Manusia yang pertama dalam mengadili suatu kasus yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan selama kekuasaan Suharto.

Dalam bulan Maret, Mahkamah Agung menegaskan pembebasan dari terdakwa pimpinan JI, yaitu Abubakar Ba'asyir, atas tuduhan pengkhianatan dan mengurangi hukuman penjaranya menjadi tuntutan imigrasi kecil, dari 3 tahun menjadi 18 bulan. Kritik terhadap Ba'asyir adalah membingungkan karena dia tidak dihukum atas tuduhan utama yaitu merencanakan pengkhianatan dan menyatakan bahwa hukuman 18 bulannya tidak sesuai untuk tindak kejahatan tersebut. Pada tanggal 30 April polisi menahan kembali Ba'asyir pada saat hukuman penjaranya berakhir. Dalam bulan Oktober Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memulai sidang pengadilan terhadapnya atas tuduhan terorisme karena diduga memberi izin untuk pengeboman Bali tahun 2002 sebagai "Emir" JI dan atas dugaan perannya dalam konspirasi yang menjurus kepada penyerangan terhadap Hotel Marriott di Jakarta pada bulan Agustus 2003. Jaksa penuntut juga menuduhnya terlibat dalam suatu komplotan yang gagal untuk menyerang Markas Besar Polri di Jakarta, maupun keterkaitannya dengan suatu tempat persembunyian senjata dan bahan peledak yang disita polisi dalam tahun 2000 di kota Semarang, Jawa Tengah. Pada akhir tahun persidangannya masih tetap berlangsung (lihat Bagian 2.b.)

Dalam bulan September Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Bambang Harymurti, Kepala Editor Majalah Tempo bersalah atas tindakan kriminal pencemaran nama baik dan menghukumnya satu tahun penjara. LSM dan wartawan mengajukan keberatan bahwa seharusnya Undang-Undang Pers yang diterapkan dalam kasus tersebut dan bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan Undang-Undang Pers akan memberikan penggugat Tomy Winata hak untuk melakukan replik atau mengenakan suatu denda kepada tempo dan bukan suatu ancaman hukuman penjara. Pada akhir tahun, Harymurti tetap bebas menunggu hasil dari permohonan bandingnya (lihat bagian 2.a.).

Banyak anggota GAM yang dicurigai ditolak haknya atas suatu persidangan yang adil. Para terdakwa jarang mempunyai pengacara yang hadir selama interogasi dan biasanya tidak mempunyai pengacara selama sidang pengadilan. Para terdakwa jarang bisa berhadapan dengan penggugat mereka: penuntutan biasanya mendasarkan kasusnya atas kesaksian yang diberikan oleh para saksi kepada para penyidik pemerintah; tidak satupun saksi atau penyidik yang menghadap di pengadilan, dan hanya pernyataan kesaksian tertulis yang disampaikan. Para jaksa penuntut jarang menghadirkan bukti fisik, yang mereka nyatakan tidak tersedia karena terdiri atas senjata militer. Seorang pengacara dengan suatu organisasi bantuan hukum menyatakan kepada AI bahwa, dalam hampir 100 kasus yang ditangani oleh organisasi ini, hanya 2 saksi pembela setuju untuk hadir.

Pada tanggal 7 September, DPR mengesahkan perundang-undangan untuk membentuk suatu "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" untuk menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia sebelum membuat rekomendasi kepada Presiden agar memberikan amnesti kepada para pelanggar dan rehabilitasi kepada para korban mereka. Perundang-undangan tersebut mengizinkan polisi untuk merekomendasikan amnesti bagi seorang pelanggar yang telah mengaku dalam kasus dimana korban tidak menyetujuinya. Setelah komisi menyelesaikan suatu kasus, maka kasus tersebut kemudian tidak bisa diajukan kepada pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada akhir tahun, badan eksekutif tidak mengumumkan undang-undang atau membentuk komisi tersebut.

Pada tanggal 12 Oktober, Hakim Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung, meresmikan Pengadilan Shari'a (Undang-Undang Islam) di Aceh. Di bawah sistem yang baru, 19 Pengadilan Agama dan satu Pengadilan

Tinggi Agama dijadwalkan akan mulai mengadili perkara. Pengadilan tersebut hanya akan mengadili kasus yang melibatkan orang Muslim dan menggunakan keputusan yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan bukan Undang-Undang Hukum Pidana (lihat Bagian 2.c.). Dalam pengaruh awal yang paling dapat dilihat, pihak berwenang mulai memberlakukan peraturan berpakaian bagi perempuan muslim.

Tidak ada laporan tentang tahanan politik di penjara.

f. Campur Tangan Sewenang-wenang terhadap Kebebasan Pribadi, Keluarga, Rumah atau Korespondensi

Undang-undang mewajibkan surat perintah pengadilan bagi penggeladahan kecuali untuk kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi dan korupsi. Undang-undang tersebut juga menetapkan pengeledahan tanpa surat perintah bilamana keadaan "mendesak dan memaksa". Para pejabat keamanan sewaktu-waktu dapat mendobrak masuk ke dalam rumah dan kantor. Pihak berwenang sewaktu-waktu memata-matai individu dan rumahnya dan mendengarkan hubungan telepon yang tersambung. Ada laporan bahwa Pemerintah seringkali melanggar hak kebebasan pribadi dari para pekerja migran, khususnya perempuan, yang kembali dari luar negeri. Pejabat yang korup kadang-kadang melakukan pengeledahan dengan menelanjangi secara sewenang-wenang terhadap para migran, mencuri barang-barang berharga mereka, dan memeras suap di jalur-jalur khusus di bagian samping bandara yang diperuntukkan bagi pekerja yang pulang.

Perselisihan tanah mengakibatkan tuntutan terhadap pengusiran tidak adil serta penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh para pejabat keamanan publik. LSM Resident Forum Jakarta, memperkirakan bahwa para pejabat keamanan publik mengusir paling sedikit 20.000 orang selama tahun ini, dibandingkan dengan 40.000 dalam tahun 2003. di Sumatera, dilaporkan bahwa masyarakat setempat yang terlibat dalam industri bubur kertas (pulp) dan kertas terus mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia secara terus menerus, termasuk penyitaan tanah oleh polisi dan para penjaga keamanan perusahaan. HRW juga menduga bahwa perusahaan seperti Arara Abadi secara rutin menyita tanah penduduk setempat untuk perkebunan, dengan sedikit atau tanpa ganti rugi.

Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang diwajibkan untuk dibawa oleh seluruh warga negara, menunjukkan agama dari pemegangnya. LSM menuduh bahwa KTP merusak tradisi pluralistik negara tersebut dan membahayakan para pemegang kartu identitas yang bepergian ke suatu daerah dengan konflik antar-agama. Para pengikut dari kelima agama yang secara resmi diakui oleh Pemerintah – Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha – mengalami sedikit atau tidak sama sekali kesulitan dalam memperoleh kartu identitas yang akurat; namun, para anggota agama minoritas seringkali ditolak baik sebuah kartu penduduk atau sesuatu yang secara akurat mencerminkan keyakinan mereka. Di samping itu, pejabat tingkat-rendah dan kepala desa, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan KTP, sering menuntut suap yang kecil atau membuat proses tersebut menjadi sangat birokratis, yang menyulitkan kelompok yang tidak mampu, seperti pekerja yang berpindah-pindah, kaum miskin, dan tuna wisma, untuk memperoleh KTP.

Di beberapa bagian negara ini, khususnya di Kalimantan dan Papua, penduduk setempat yakin bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah mengganggu cara hidup tradisional, penggunaan tanah, dan peluang ekonomi mereka. Selama tahun ini, program tersebut memindahkan paling sedikit 87.678 KK dari daerah-daerah yang kelebihan penduduk ke 369 daerah yang lebih terisolasi dan kurang berkembang di 24 propinsi yang berbeda. Pemerintah mengirim paling sedikit 12.329 KK ke Kalimantan Tengah, dan sekali lagi membuat propinsi tersebut sebagai tempat tujuan utama. Namun, transmigrasi jauh lebih sedikit dibanding era Suharto.

Pemerintah menggunakan wewenang, dan sewaktu-waktu intimidasi, untuk mengambil alih tanah bagi proyek-proyek pembangunan, sering tanpa ganti rugi yang adil. Dalam kasus lain, Badan Usaha Milik Negara dituduh membahayakan sumber daya hidup dimana mata pencaharian warga sangat bergantung.

Bagian 2 Penghargaan terhadap Kebebasan Sipil, Termasuk:

a. Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Pers

Undang-Undang Dasar menetapkan kebebasan berbicara dan kebebasan pers; namun, Pemerintah sewaktu-waktu membatasi hak-hak tersebut di dalam praktek. Selama tahun ini, Pemerintah memenjarakan paling

sedikit 7 orang pemrotes damai anti-pemerintah yang dituduh “menghina Presiden” atau “menyebarkan kebencian terhadap Pemerintah”. Di samping itu, para politikus dan pengusaha yang berkuasa lebih sering mengajukan keberatan kriminal atau perdata terhadap wartawan yang tulisannya menurut mereka menghina atau menentang. Juga selama tahun ini, para wartawan menghadapi ancaman kekerasan yang semakin meningkat.

Dalam bulan September, persidangan dari enam mahasiswa dan aktivis tenaga kerja karena menghina mantan presiden dalam suatu demonstrasi pada tanggal 3 April, dibuka di Makassar, Sulawesi Selatan. Para terdakwa adalah Rudi Hartono, Ketua Liga Mahasiswa Demokrasi Nasional Makassar; Ihsar Yatim; Al Ilyas Akbar, Direktur Asosiasi Kaum Miskin Indonesia, Muhammad Anshar, Ketua Front Nasional untuk Serikat Pekerja Indonesia Bersatu; Wahida Baharuddin Upa; dan Petrus Pice Jailahi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Pada tanggal 23 Desember, seorang mahasiswa lain ditahan karena menghina Presiden saat ia dituduh membakar gambar dari Susilo Bambang Yudhoyono.

Di Propinsi Aceh, kebebasan pers sangat dibatasi selama tahun ini. Para Penguasa Darurat Militer dan Darurat Sipil membatasi akses para wartawan dan diplomat asing, memblokir telepon genggam, dan melarang kontak dengan GAM. Wartawan di Aceh mengalami kesulitan yang besar untuk beroperasi di bawah keadaan Darurat Militer dan Darurat Sipil. Suatu keputusan pemerintah mewajibkan setiap kegiatan peliputan berita agar “didukung oleh izin tertulis dari Kepala Penguasa Darurat Militer Aceh”; namun, pelaksanaan keputusan tersebut tidak menentu. Dalam praktek, hanya wartawan asing dan wartawan lokal yang membuat laporan untuk organisasi berita asing diwajibkan untuk memperoleh izin tersebut. Tidak ada sensor langsung, tetapi wartawan lokal diintimidasi oleh kritik juru bicara Angkatan Darat dengan cerita-cerita khusus, maupun dengan telepon yang membujuk dari komandan militer kepada para wartawan untuk membuat laporan “secara patriotik”. Wartawan juga khawatir bahwa pelaporan kritis dapat menyebabkan mereka kehilangan akses ke briefing pers dari militer. Akhirnya, situasi keamanan yang tidak menentu membatasi akses ke banyak daerah. Pemerintah mencabut pembatasan terhadap wartawan domestik pada saat mengakhiri Darurat Militer dalam bulan Mei tetapi mempertahankan pembatasan terhadap wartawan asing. Sebagai suatu masalah praktis, wartawan propinsi tersebut tampaknya enggan untuk menggunakan sepenuhnya kebebasan pers mereka, karena takut terhadap kemungkinan tindakan balas dendam oleh GAM atau oleh otoritas pemerintah. Walaupun wartawan asing secara resmi tidak dilarang untuk bepergian ke Propinsi Papua, Maluku, dan Maluku Utara atau ke kota-kota Sampit, Poso dan Palu, pemerintah mengeluarkan suatu seruan kepada wartawan asing untuk tidak memasuki daerah-daerah tersebut secara khusus dan sering menolak permintaan mereka melakukan hal tersebut. Menurut suatu stasiun penyiaran yang berbasis di Jakarta, seorang wartawan radio telah dipukul oleh Brimob dan personil TNI setelah ditangkap saat mewawancarai seseorang di suatu “daerah hitam” (daerah di Aceh yang dianggap sebagai kubu GAM termasuk Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Selatan) yang ditetapkan oleh militer.

Wartawan menghadapi kekerasan dan intimidasi dari polisi, prajurit, pejabat pemerintah, pemberontak, preman, mahasiswa dan warga biasa. Selama tahun ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat paling sedikit 17 serangan fisik terhadap wartawan maupun 8 tindakan non-fisik yang termasuk ancaman mati dan tuntutan hukum. Misalnya, pada tanggal 13 Juli, Benny Djahang, seorang wartawan Nusa Tenggara Timur, “ditinju dan dicekik” oleh John Oga, seorang anggota DPR propinsi, saat menghadiri suatu sidang pleno dari DPR Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dilaporkan bahwa penyerangan tersebut merupakan respon terhadap sebuah cerita yang ditulis oleh Djahang seminggu sebelumnya, yang memperinci penahanan Oga dan dua anggota dewan lainnya.

Pemerintah melakukan sedikit atau tidak sama sekali kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas serangan yang kasar terhadap wartawan di Aceh dalam tahun 2003, termasuk serangan terhadap Jamaluddin, juru kamera TVRI, Idrus Jeumpa, wartawan Harian Waspada, dan Alif Imam Nurlambang, wartawan radio 68H.

Menurut AJI, tidak seperti dalam tahun 2003, tidak ada laporan tentang wartawan yang dikeluarkan dari Aceh.

Dalam bulan Maret 2003, orang-orang yang terkait dengan gembong wartawan Tomy Winata, memasuki kantor pusat Majalah Tempo di Jakarta dan mengkritik suatu tulisan yang menyatakan bahwa Winata memperoleh keuntungan dari suatu kebakaran yang menghancurkan sebuah pasar di Jakarta. Mereka menyerang para wartawan Tempo, termasuk kepala redaksi Bambang Harymurti, di kantor pusat dan kemudian di sebuah pos polisi. Para pengacara Tempo melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan menuntut para

penyerang, tetapi hakim membebaskan pimpinan kelompok tersebut. Para pengacara Winata menanggapi dengan memprakarsai empat tuntutan hukum (dua perdata dan dua kriminal), yang dinyatakan oleh para aktivis pers bebas sebagai usaha untuk mengintimidasi media. Pada tanggal 14 September, Pengadilan Negeri Jakarta menolak dua keputusan Pengadilan Negeri atas tuntutan perdata terhadap Tempo, yang menguntungkan Tempo dan membebaskan denda yang dikenakan oleh pengadilan negeri terhadap majalah tersebut. Namun, 2 hari kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Tempo bersalah atas tindakan kriminal pencemaran nama baik dan menghukum Bambang Harymurti satu tahun penjara; pengadilan tersebut membebaskan wartawan Tempo Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali. Para pemantau Hak Asasi Manusia menyebutkan keputusan tersebut sebagai suatu pukulan terhadap kebebasan pers di negara ini dan mengkritik keputusan jaksa penuntut karena menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas pencemaran nama baik dan bukan Undang-Undang Pers tahun 1999. Pada akhir tahun Harymurti tetap bebas menunggu suatu keputusan pengadilan tinggi terhadap permohonan bandingnya.

Pada tanggal 23 Desember, mantan manajer umum dari harian Radar Yogya telah dihukum 9 bulan penjara karena memfitnah setelah dia mempublikasi tulisan yang menuduh manajer umum sebuah harian saingan telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anggota stafnya. Hakim dalam kasus tersebut menolak untuk memberitahu pers mengapa ia menerapkan Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan Undang-Undang Pers tahun 1999 yang ada.

Selama tahun ini, para pejabat pemerintah mengajukan tiga kasus kriminal terhadap wartawan di bawah Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik.

Selama tahun ini, Pemerintah tidak mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap wartawan dalam tahun 2003. Namun, dalam tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Gubernur Jakarta Sutiyoso untuk meminta maaf kepada seorang wartawan yang diintimidasi oleh seorang petugas ketertiban umum kota yang mencoba untuk mencegahnya meliput suatu pengusiran dalam tahun 2002. Sutiyoso kalah dalam permohonan bandingnya ke suatu Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung. Permohonan banding tersebut tetap berada dalam pertimbangan pada akhir tahun.

Korupsi yang meresap di antara wartawan dan kurangnya penegakan kode etik wartawan membahayakan integritas dari beberapa wartawan.

Selama tahun ini, Pemerintah melaksanakan Undang-Undang Penyiaran 2002, yang mencakup langkah-langkah untuk mengeluarkan lisensi bagi penambahan frekuensi dan pembentukan sebuah komisi penyiaran yang tidak berpihak.

Walaupun ada banyak insiden kekerasan dan intimidasi terhadap pers, ada perkembangan yang positif. Persatuan antara para wartawan dan komitmen mereka untuk melindungi rekan-rekan mereka tampaknya telah diperkuat. Beberapa anggota pers juga terus melakukan pelaporan agresif terhadap isu-isu seperti korupsi, konflik di Aceh, dan degradasi lingkungan. Media regional semakin berkembang. Di samping itu, jumlah dan popularitas publikasi Islam moderat semakin meningkat.

Lembaga Sensor Film yang disupervisi pemerintah terus mensensor film-film dalam negeri dan impor, sehubungan dengan isi yang dianggapnya porno atau menentang agama. Dalam bulan Agustus, lembaga tersebut memerintahkan agar film lokal "Buruan Cium Gue" ditarik dari bioskop-bioskop setelah para pimpinan agama mengajukan keberatan bahwa film tersebut akan mendorong para pemuda untuk melakukan kegiatan seks.

Menurut undang-undang, ajaran komunis tidak dapat disebar atau dikembangkan.

Pemerintah tidak melarang penggunaan atau isi dari Internet.

Undang-undang menetapkan kebebasan akademis, dan Pemerintah menghormati ketentuan ini.

b. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat secara Damai

Undang-undang menetapkan kebebasan untuk berkumpul; namun, pemerintah membatasi hal ini dalam bidang-bidang tertentu. Undang-undang pada umumnya tidak mewajibkan izin untuk berkumpul di bidang sosial, kebudayaan, atau agama bagi publik; namun, berkumpulnya lima orang atau lebih yang berkaitan dengan kebijakan politik, tenaga kerja atau publik, memerlukan pemberitahuan polisi, dan demonstrasi memerlukan suatu izin.

Selama tahun ini, polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan pada sejumlah demonstrasi. Misalnya, pada tanggal 1 Mei di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi secara paksa memasuki kampus Universitas Muslim Indonesia dan mencederai 65 mahasiswa yang berdemonstrasi terhadap penahanan Abu Bakar Ba'asyir, seorang imam Muslim radikal dan tersangka pimpinan JI. Dilaporkan bahwa para demonstran telah menyandera seorang petugas polisi di kampus tersebut dan menyerang dua yang lain. Respon polisi yang kasar mengakibatkan pemecatan terhadap Kepala Polisi Daerah (Kapolda) dan beberapa perwira senior lainnya. Polisi menyelidiki insiden itu dan menyatakan 22 tersangka polisi, 8 diantaranya dihukum karena melakukan kekerasan kolektif di depan publik dan menghukum mereka antara 7 dan 12 bulan. Pada tanggal 26 Februari, polisi secara paksa membubarkan suatu demonstrasi damai yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Bandung. Lusinan mahasiswa cedera, 23 diantaranya dibawa ke rumah sakit.

Dalam bulan ini, sidang pengadilan pengkhianatan 17 tertuduh aktivis dari Front Kedaulatan Maluku dimulai atas tindakan demonstrasi separatis yang mencetuskan kekerasan yang baru. Dalam bulan Agustus, Pengadilan Negeri Ambon memulai persidangan terhadap 36 orang lain yang dituduh atas pengkhianatan yang berkaitan dengan demonstrasi bulan April dan Mei yang berakhir dengan kekerasan.

Ada laporan tentang kelompok anti-pemrotes yang melanggar hak berkumpul secara damai dalam kasus perselisihan tenaga kerja.

Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pembubaran paksa tahun 2002 oleh polisi Jakarta terhadap para peserta di dalam suatu demonstrasi besar menentang dipilihnya kembali Gubernur Sutiyoso. Demikian juga, tidak ada penahanan yang dilakukan berkaitan dengan distribusi makanan yang mengandung sianida pada demonstrasi yang sama. Di samping itu, tidak ada penahanan yang dilakukan sehubungan dengan penyerangan tahun 2002 di kota Semarang, Jawa Tengah terhadap dua aktivis anti-kemiskinan yang dinyatakan sebagai anggota PDI-P yang berkuasa, dan tidak juga ada penahanan yang dilakukan berkaitan dengan penyerangan Maret 2002 terhadap mahasiswa di Jawa Timur oleh anggota PDI-P.

Undang-Undang Dasar menetapkan kebebasan berserikat; namun, pemerintah melarang penggunaan hak tersebut di daerah-daerah konflik separatis. Walaupun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengizinkan pengibaran bendera yang melambangkan identitas kebudayaan Papua, polisi melarang pengibaran bendera Bintang Kejora, yang diidentifikasi sebagai perjuangan separatis bersenjata.

Ada laporan tentang pembatasan terhadap berkumpul secara damai di Aceh, dimana LSM dan para aktivis menghadapi pembatasan ketat atas kegiatan mereka selama Darurat Militer dan Darurat Sipil. Para penyelenggara kegiatan seringkali diharuskan agar sebelumnya mengajukan nama-nama para pembicara dan teks pidato mereka untuk mendapatkan persetujuan, yang seringkali ditolak. Hal ini mengakibatkan kehati-hatian dan pembatasan yang dikenakan sendiri oleh para penyelenggara kegiatan tersebut. Di luar Banda Aceh, propinsi tetap tertutup bagi orang asing. Dalam bulan April, polisi membubarkan sekelompok mahasiswa universitas yang berdemonstrasi dalam kaitan dengan SAMAN (Solidaritas untuk Mahasiswa Aceh Nusantara) yang menuntut diakhirinya Darurat Militer; polisi menahan seorang koordinator demonstrasi tetapi kemudian membebaskannya. Satuan keamanan terus memberlakukan suatu larangan untuk mengibarkan bendera GAM di Aceh. Demonstrasi dan pertemuan politik yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden diizinkan dan terjadi tanpa insiden yang signifikan.

Pada akhir tahun, Muhammad Nazar, Ketua SIRA, tetap berada dalam tahanan. Nazar ditahan sejak bulan Februari 2003 karena merencanakan suatu demonstrasi publik di Lhokseumawe.

c. Kebebasan Beragama

Undang-Undang Dasar menetapkan "hak bagi semua orang untuk beribadah menurut agama atau keyakinannya masing-masing" dan menyatakan bahwa "negara berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa". Pemerintah pada umumnya menghormati ketentuan yang pertama, tetapi hanya lima keyakinan utama – Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha – menerima pengakuan resmi dalam bentuk perwakilan di Departemen Agama. Kelompok agama lain bisa mendaftar pada pemerintah, tetapi hanya di Departemen Dalam Negeri dan hanya sebagai organisasi-oranisasi sosial. Kelompok-kelompok tersebut mengalami diskriminasi secara resmi dan secara sosial. Undang-undang tidak mengakui atheisme, dan dalam arti kata praktis, semua orang diwajibkan untuk mengidentifikasi diri mereka dengan salah satu dari kelima keyakinan yang diakui oleh Pemerintah.

Sistem catatan sipil terus melakukan diskriminasi terhadap anggota agama minoritas. Para Petugas Catatan Sipil menolak untuk mendaftar perkawinan atau kelahiran dari anak-anak penganut animisme, Konfusius, anggota kepercayaan Baha'i, dan lain-lain karena mereka tidak termasuk di dalam salah satu dari lima keyakinan yang diakui secara resmi. Penganut agama Hindu, walaupun ada pengakuan resmi terhadap agama mereka, kadang-kadang harus bepergian agak jauh untuk mendaftarkan perkawinan atau kematian, karena petugas lokal tidak dapat atau tidak mau melakukan pendaftaran tersebut. Orang-orang yang agamanya tidak termasuk di dalam salah satu dari lima keyakinan yang diakui secara resmi, maupun orang-orang keturunan Cina, mempunyai kesulitan dalam memperoleh KTP, yang diperlukan untuk mendaftarkan perkawinan, kelahiran, dan perceraian. Beberapa LSM dan kelompok advokasi agama mendesak Pemerintah untuk menghapuskan kategori agama dari KTP (lihat Bagian 1.f.).

Laki-laki dan perempuan beda agama mengalami kesulitan untuk menikah dan untuk mendaftarkan suatu perkawinan. Pemerintah menolak untuk mendaftarkan suatu perkawinan sebelum dilakukan suatu upacara perkawinan agama. Namun, sangat sedikit petugas keagamaan bersedia untuk mengambil bagian dalam suatu perkawinan yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan dari keyakinan yang berbeda. Untuk alasan ini, beberapa calon pengantin perempuan dan pengantin laki-laki pindah ke agama pasangan mereka. Yang lain mengambil jalan dengan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menikah.

Para missioner asing yang memperoleh visa pada umumnya diizinkan untuk bekerja tanpa pembatasan yang serius.

Selama tahun ini, pemerintah tidak mengambil langkah-langkah konkrit untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang kontroversial dari Undang-Undang Pendidikan yang mewajibkan sekolah agar memberikan pengajaran agama bagi siswa menurut keyakinannya.

Sebagaimana dalam tahun sebelumnya, beberapa partai politik mengadvokasi perubahan Undang-Undang Dasar agar mengadopsi Shari'a di seluruh negeri, tetapi sebagian besar anggota DPR dan organisasi-organisasi sosial muslim yang terbesar di negara ini tetap menentang usulan tersebut.

Dalam bulan Maret 2003, di Propinsi Aceh, Pemerintah memulai pelaksanaan Syari'a dengan mengeluarkan suatu keputusan Presiden untuk mendirikan pengadilan-pengadilan hukum Islam. Pada tanggal 12 Oktober, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan meresmikan pengadilan Syari'a yang pertama di Aceh. Di bawah sistem yang baru, 19 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi dijadwalkan untuk mulai mengadili kasus. Pengadilan-pengadilan tersebut hanya akan mengadili kasus-kasus yang melibatkan orang Muslim dan tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi "qanun", suatu keputusan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Pemerintah kota Lhokseumawe membuat qanun untuk kota tersebut dan mulai merekrut para pemantau hukum Islam sampai ke tingkat desa. Qanun tersebut mencakup isu-isu seperti "tingkah laku tidak bermoral". Misalnya, suatu hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa dihukum dengan hukuman cambuk di depan umum atau suatu denda sampai US\$ 555 (Rp. 4,9 juta). Qanun yang lain melarang perjudian serta produksi, distribusi, atau konsumsi alkohol. Seorang Muslim yang dinyatakan bersalah karena mengkonsumsi alkohol akan menerima 40 cambukan. Beberapa orang di Aceh khawatir bahwa pelaksanaan dari Syari'a akan memberikan kekuasaan yang baru kepada lembaga penegakan hukum yang memang sudah tidak dipercaya dan memberikan kesempatan untuk mencampuri urusankeagamaan pribadi, seperti apakah seorang individu menghadiri sembahyang Jum'at.

Kelompok perempuan membantu dalam membuat rancangan peraturan daerah untuk menghindari ketentuan yang mungkin membatasi hak perempuan. Namun, karena tidak ada perempuan di dalam Majelis Permusyawaratan Ulama, kecuali jabatan sekretaris dan posisi pelayanan di tingkat lebih rendah yang lain, maka perempuan sebagian besar tetap dimarjinalkan. Selama tahun ini, pemeriksaan jilbab sering dilakukan oleh berbagai kelompok. Ada proses tiga-langkah bagi perempuan yang melakukan pelanggaran. Setelah

mengeluarkan dua peringatan tertulis, pihak yang berwajib merujuk pelanggaran tersebut ke pengadilan Syari'a. Di Banda Aceh, polisi menangkap perempuan yang berpakaian tidak sesuai dengan pakaian Muslim dan menahan mereka untuk jangka waktu yang singkat di kantor pelaksanaan Syari'a, dimana orang perempuan tersebut diberikan ceramah tentang pakaian yang sesuai. Pemerintah daerah dan kelompok-kelompok di daerah lain juga melakukan kampanye untuk mempromosikan penyesuaian oleh perempuan terhadap ajaran Syari'a (lihat Bagian 5). Beberapa perempuan mengatakan kepada wartawan bahwa mereka merasa dipermalukan saat ditahan karena pelanggaran terhadap aturan berpakaian.

Di beberapa kotamadya, para pemimpin setempat menerapkan praktek Islam yang lebih ketat. Misalnya di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, peraturan setempat mewajibkan semua Pegawai Negeri Muslim untuk mengenakan pakaian Muslim setiap hari Jum'at dan menghadiri sholat lohor berjamaah. Sesungguhnya semua perempuan mentaati peraturan tersebut, dan kelompok perempuan, termasuk Solidaritas Perempuan, menyatakan bahwa perempuan takut untuk tidak mentaatinya. Pada tanggal 12 Januari, Walikota Tangerang, sebuah kota di pinggiran Jakarta, memerintahkan Pegawai Negeri untuk mengenakan pakaian Muslim pada hari Jum'at. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Bupati memberlakukan Undang-Undang Syari'a yang terbatas yang melarang alkohol dan mewajibkan untuk mengenakan pakaian Muslim serta melakukan sholat wajib setiap hari. Namun, peraturan-peraturan tersebut hanya berlaku bagi orang Muslim dan tidak dijalankan.

Sebagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya, selama bulan puasa Ramadhan, banyak pemerintah daerah memerintahkan penutupan atau membatasi jam operasi berbagai jenis tempat "hiburan". Misalnya, pada tanggal 9 Oktober Pemerintah Kotamadya Kendari, Medan, Palembang, dan Pekanbaru memerintahkan penutupan semua diskotik, panti pijat, tempat karaoke, tempat minum, dan bar selama bulan Ramadhan. Namun, pihak yang berwenang mengatakan, mereka akan mengizinkan bar dan tempat karaoke di hotel yang melayani turis asing agar tetap buka. Pemerintah Kota Medan memerintahkan penutupan tempat-tempat tersebut pada tanggal 24 dan 25 Desember untuk menghormati hari Natal. Pelaksanaan perintah tersebut beraneka ragam.

Ketegangan politik dan ekonomi antara orang Kristen dan Muslim di propinsi-propinsi bagian timur seperti Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara, terus menyebabkan kekerasan sektarian, yang mengakibatkan pembunuhan di luar hukum. (lihat Bagian 1.a.).

Selama tahun ini, lebih dari 10 gereja telah diserang, dibandingkan dengan 7 gereja dalam tahun 2003. Di samping penyerangan di ibukota Sulawesi Tengah dan Maluku tersebut, ada juga penyerangan di Jawa Barat, yaitu di Purwodadi, Margahayu, Tangerang, Bogor, Banten; masyarakat Ciputat dan Pamulang di Jakarta; dan kota Yogyakarta di Jawa Tengah. Penyerangan tersebut terdiri atas perusakan, pembakaran, penembakan, kekerasan massa, dan penutupan paksa. Satu masjid telah dirusak di Maluku selama tahun ini.

Disebabkan oleh kekerasan yang baru di Ambon dalam bulan April dan Mei, toleransi dan kerjasama antar-agama antara orang Kristen dan Muslim di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah, masih tetap buruk. Di Maluku, pemerintah daerah terus menyatukan kembali banyak kantor pemerintah yang sejak tahun 1999 telah terpisah menjadi unit-unit Kristen dan Muslim.

Untuk diskusi yang lebih terperinci, lihat [Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2004](#).

d. Kebebasan Bergerak di dalam Negeri, Perjalanan Luar Negeri, Emigrasi, dan Repatriasi

Undang-Undang Dasar mengizinkan Pemerintah untuk mencegah orang memasuki atau meninggalkan negara, dan kadang-kadang Pemerintah membatasi kebebasan bergerak. Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya memberikan kekuasaan yang luas kepada militer dalam keadaan darurat, termasuk kekuasaan untuk membatasi lalu-lintas darat, udara, dan laut; namun, pemerintah tidak menggunakan kekuasaan tersebut.

Pemerintah terus membatasi kebebasan bergerak melalui suatu sistem "surat jalan", yang diperlukan untuk perjalanan di Maluku, Aceh, dan Papua. Pelaksanaannya tidak konsisten.

Pada tanggal 19 Mei, Presiden Megawati mengeluarkan keputusan untuk mengakhiri darurat militer di Aceh dan menetapkan keadaan darurat sipil, yang masih tetap berlaku pada akhir tahun. Keputusan tersebut mengembalikan seluruh wewenang pemerintah atas propinsi tersebut kepada Gubernur, tetapi Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD), yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), mempertahankan

kekuasaan dalam mengeluarkan langkah-langkah darurat untuk mengawasi perjalanan, perdagangan, perhubungan, dan kegiatan sipil lainnya.

Pemerintah melakukan pengawasan baru terhadap pergerakan penduduk di Aceh dengan mengeluarkan kartu identitas nasional baru khusus untuk Aceh. Kartu tersebut memerlukan tanda tangan komandan militer, kepala polisi, dan kepala desa setempat dari si pemegang kartu. Orang Aceh yang ingin bepergian atau meninggalkan propinsi tersebut harus memperlihatkan kartu tersebut di pos-pos keamanan sepanjang jalan raya utama. Gagal untuk memperlihatkan kartu tersebut menyebabkan penahanan. Dalam praktek, kartu tersebut mudah diperoleh, dan tidak ada bukti bahwa kebijakan tersebut mengakibatkan pembatasan bergerak. Di Aceh, mereka yang berada di luar Banda Aceh juga harus memperoleh surat jalan dari polisi yang menguraikan tentang tujuan dan lamanya perjalanan, dan juga menyebutkan nama dari orang-orang yang akan ditemui oleh orang yang akan melakukan perjalanan tersebut. Di daerah-daerah konflik, individu juga diwajibkan agar melapor ke polisi saat meninggalkan desa untuk menangkap ikan, mengurus sawah, atau meninggalkan desanya, yang secara signifikan menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan suatu mata pencaharian.

Pemerintah juga mengawasi pergerakan sampai ke dekat jalan raya yang memasok para pemberontak GAM. Di kecamatan Lokop yang terpencil di Aceh Timur, yang merupakan lokasi dari 30 desa dan tempat beradanya pemberontak dalam jumlah besar, unit-unit TNI memantau dan mengawasi pengiriman makanan yang masuk dan keluar desa-desa tersebut dan membatasi pengiriman ke para pemasok yang berhubungan dengan TNI. Menurut kantor cabang KontraS, tentara juga membatasi jumlah makanan yang dapat dibeli setiap keluarga, sehingga mengakibatkan kekurangan gizi. Di samping itu, dilaporkan bahwa tentara membatasi waktu yang dapat digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dan petani untuk bekerja di sawah mereka.

Di Kalimantan Tengah, dimana perpecahan etnis di tahun 2001 dengan cepat mengakibatkan 130,000 etnis Madura pergi, kebanyakan ke Madura, dan Jawa Timur lainnya, sedikitnya 45,000 secara sukarela kembali ke Kalimantan. Namun, sementara ini, sejumlah pemerintahan kabupaten, termasuk di Barito Utara, Barito Selatan, dan Kotawaringin Barat, telah mengeluarkan peraturan yang melarang kembalinya etnis Madura kecuali bila mereka dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah pernah tinggal di daerah tersebut dan tidak memiliki catatan kriminal.

Pemerintah mencegah paling sedikit 412 orang untuk meninggalkan negara selama tahun ini. Kejaksaan Agung dan Kantor Kejaksaan Tinggi mencegah sebagian besar keberangkatan tersebut. Beberapa di antara mereka yang dihalangi untuk meninggalkan negara adalah para penunggak pajak, sementara yang lain terlibat dalam perselisihan hukum. Ada laporan tentang pemerintah yang menghalangi beberapa orang asing untuk meninggalkan negara tanpa penerapan hukum yang tepat.

Dalam bulan Juni, Pemerintah mengeluarkan Sidney Jones, Director sebuah LSM internasional, yaitu International Crisis Group (ICG) (lihat Bagian 4). Undang-Undang Dasar melarang pengasingan paksa, dan pemerintah tidak menggunakannya.

Pemerintah terus melakukan kemajuan dalam mengurangi jumlah pengungsi di dalam negeri (IDPs). Kantor PBB untuk koordinasi bantuan kemanusiaan (OCHA) memperkirakan bahwa ada 1.478.736 pengungsidi Indonesia selama tahun ini, dibandingkan dengan 587.000 dalam tahun 2003. OCHA melaporkan bahwa ada 6.946 pengungsi di Aceh pada bulan Juni, tetapi jumlah ini sangat meningkat sebagai akibat dari tsunami tanggal 26 Desember. Menurut Koalisi LSM untuk Aceh dan KontraS, masih terdapat dua kamp pengungsi di Aceh sebelum tsunami. Operasi militer di Aceh tidak mengakibatkan arus pengungsi yang besar keluar perbatasan propinsi tersebut. Sejumlah pengungsi tinggal di tempat penampungan darurat, sementara yang lain tinggal dengan keluarga penampung atau terintegrasi ke dalam masyarakat setempat. Pemerintah menangani banyak aspek darurat tetapi terus mengandalkan organisasi dan donor internasional untuk membantu sebagian besar kebutuhan pengungsi. Dalam teori, pengungsi mempunyai tiga pilihan: kembali ke tempat asal mereka, memulai sesuatu yang baru di lokasi sekarang dengan bantuan pemerintah, atau bermukim kembali melalui suatu program relokasi. Dalam beberapa hal, termasuk di Sumatra Utara, bantuan pemerintah berjumlah satu kali pembayaran sebesar kira-kira US\$ 1.000 (Rp. 9 juta) per keluarga.

Dalam bulan Juni 2003, di Pulau Ternate, Maluku Utara, ribuan pengungsi menyatakan bahwa Gubernur telah mencuri bantuan yang diperuntukkan bagi pemulangan mereka ke Pulau Halmahera, bentrok dengan polisi dan tentara. Dilaporkan bahwa tidak ada yang cedera. Pada tanggal 24 September, Pengadilan Negeri Ambon mulai mengadili Husni Lessy, Kepala Bidang Bina Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku. Lessy,

yang bertanggung jawab atas distribusi beras kepada pengungsi mulai bulan Januari sampai September 2002, menghadapi tuduhan meminta “komisi” sebelum mendistribusi beras tersebut. Ia dituduh meminta lebih dari US\$ 18.888 (Rp. 170 juta) untuk pembayaran ganti rugi dan mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$ 555.555 (Rp. 4,1 milyar). Para aktivis LSM yang bekerja dengan para pengungsi melaporkan bahwa, di daerah konflik, Pemerintah melakukan sedikit atau tidak melakukan apa-apa sama sekali untuk melihat bahwa ganti rugi telah diberikan terhadap kerugian yang diderita atau bahwa keadilan telah diberlakukan bagi mereka yang bertanggung jawab. Para aktivis melaporkan bahwa para pengungsi rentan terhadap perdagangan orang, dan yang lain memperingatkan bahwa kekerasan yang meluas dapat menyala kembali pada setiap saat di beberapa wilayah.

Walaupun undang-undang tidak mencakup ketentuan untuk memberikan status atau suaka pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi definisi di dalam Konvensi PBB Mengenai Kedudukan Pengungsi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967, tidak ada laporan tentang pengembalian paksa terhadap orang-orang ke suatu negara dimana mereka takut terhadap penganiayaan. Pemerintah bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), yang mempunyai kantor di Jakarta. Pada akhir tahun ada 113 pengungsi yang diakui PBB dan 60 pencari suaka yang tinggal di negara ini. Beberapa merupakan pemohon dan yang lain merupakan tanggungan. Sebagian besar pencari suaka berasal dari Irak, Afganistan, atau Somalia. Beberapa dari pengungsi tersebut telah diterima oleh negara-negara Barat untuk pemukiman kembali tetapi belum berangkat.

Angka-angka di atas tidak termasuk kira-kira 10.000 bekas pengungsi dari Timor Timur yang tinggal di Timor Barat pada akhir tahun. Dalam tahun 2003, Pemerintah dan UNHCR menyatakan bahwa sisa orang Timor Timur yang tinggal di Timor Barat tidak lagi akan dianggap sebagai pengungsi. Sebagian besar dari bekas pengungsi tersebut tinggal di kamp-kamp sementara di wilayah Atambua dan Kupang, Timor Barat. Banyak dari individu tersebut tidak ingin kembali ke tempat asal mereka; yang lain ingin kembali tetapi ternyata merasa terhambat oleh mereka yang menentang pengembalian. Menurut kelompok hak pekerja Solidarity Center di Jakarta, ratusan nelayan Myanmar, yaitu pengungsi yang ternyata dipaksa kerja di kapal nelayan Thailand, melarikan diri atau ditinggalkan di Tual, suatu pulau kecil di Maluku, di mana mereka hidup dalam kondisi yang sulit. Aparat imigrasi secara paksa memulangkan kembali sejumlah nelayan Myanmar melalui kapal nelayan asing.

Bagian 3 Penghargaan terhadap Hak Politik: Hak Warga untuk Mengganti Pemerintahnya

Selama tahun ini, pelaksanaan dari beberapa perubahan konstitusi meningkatkan kemampuan warga untuk mengganti pemerintahnya. Undang-Undang Dasar memberikan warga hak untuk mengganti pemerintahnya secara bertahap, damai, dan bebas berdasarkan hak pilih universal. Dalam prakteknya penggunaan hak tersebut adalah melalui pemilihan umum legislatif secara damai pada tanggal 5 April dan pemilihan Presiden langsung yang pertama di negara tersebut pada tanggal 5 Juli, dengan putaran kedua pada tanggal 20 September, saat Susilo Bambang Yudhoyono mengalahkan Presiden Megawati yang sedang memegang kekuasaan. Undang-Undang Dasar menetapkan pemilihan umum setiap 5 tahun. Hampir sepanjang tahun ini, polisi dan militer terus memegang jatah 38 kursi gabungan dalam DPR dan 10 persen dari kursi di DPRD tingkat Propinsi dan Kabupaten; namun, sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 2002, dalam bulan Oktober polisi/militer kehilangan kursi DPR mereka bersamaan dengan dilantiknya anggota badan legislatif yang baru. Para anggota DPR secara otomatis merupakan anggota MPR, yang sampai bulan Oktober mencakup wakil daerah dan pemerintah yang diangkat. Pada tanggal 1 Oktober, MPR menjadi suatu badan yang dipilih secara penuh, terdiri atas 550 anggota DPR (50 kursi ditambahkan sesuai dengan undang-undang yang diadopsi dalam tahun 2003) dan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pengamat lokal dan internasional memantau pemilihan legislatif dan presiden, yang diatur oleh suatu komisi pemilihan independen dan menganggap bahwa sebagian besar pemilihan tersebut adalah bebas dan adil.

MPR dapat merubah Undang-Undang Dasar dan mengeluarkan keputusan, yaitu fungsi yang dilaksanakannya dalam “sidang tahunan” pertama, yang diselenggarakan dalam tahun 2000. Suatu tuntutan utama dari gerakan reformasi pasca-1998 adalah peninjauan seksama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilihat sebagai telah memelihara pembentukan rezim-rezim otoriter di masa lalu. Dalam Perubahan Pertama dari Undang-Undang Dasar, MPR 1999 mengesahkan pengekangan terhadap kekuasaan eksekutif, termasuk batasan dua kali 5 tahun masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tahun 2000, MPR mengadopsi Perubahan Kedua, yang mengandung banyak perubahan penting, termasuk ketentuan bagi perlindungan hak asasi manusia, otonomi daerah, dan pemisahan kekuasaan selanjutnya. Selama masa sidang tahun 2001, MPR

merubah Undang-Undang Dasar dan menetapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, badan legislatif bikameral dengan dewan perwakilan daerah, dan suatu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuasaan melakukan peninjauan hukum terhadap perundang-undangan, perselisihan pemilihan tertentu, dan laporan pertanggungjawaban. Mahkamah Konstitusi ini diresmikan dalam tahun 2003. Dalam tahun 2002, MPR menyetujui Perubahan Keempat, yang mewajibkan para calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih bersama-sama dalam satu paket. Perubahan tersebut juga menetapkan adanya putaran kedua pemilihan langsung bilamana tidak ada calon yang memperoleh mayoritas suara dan paling sedikit 20 persen dari jumlah suara di setengah jumlah propinsi. MPR tetap memegang wewenang untuk merubah Undang-Undang Dasar tetapi tidak lagi diberi kekuasaan untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Perubahan-perubahan konstitusional juga membatasi wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden. Perubahan 1999-2002 menjadikan Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab langsung kepada mereka yang memilihnya.

Semua warga yang dewasa memenuhi syarat untuk memilih kecuali para anggota angkatan bersenjata yang masih bertugas aktif, mereka yang menjalani hukuman 5 tahun atau lebih, orang-orang yang menderita cacat mental, dan orang-orang yang dicabut hak pilihnya oleh suatu keputusan pengadilan yang sudah final. Mantan anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang, diizinkan untuk memilih, dan menyusul suatu keputusan Pengadilan Konstitusional dalam tahun ini, mereka sekarang boleh mencalonkan diri untuk dipilih. Keputusan ini menandai suatu langkah maju yang penting dalam memperbaiki hak dasar para korban rejim Orde Baru Suharto.

Ada suatu persepsi domestik dan internasional yang luas bahwa korupsi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari bilamana berurusan dengan pihak otoritas di badan eksekutif dan legislatif. Perlunya menangani korupsi merupakan isu yang paling utama dalam kampanye pemilihan tahun ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluh bahwa korupsi merupakan hal yang sistemik di negara tersebut, dan ini merupakan fokus utama dari program pemerintahan 100-hari pertamanya.

Dua versi dari Undang-Undang Kebebasan Informasi sudah ada di DPR untuk dipertimbangkan pada akhir tahun. Satu merupakan draft pemerintah dan yang lain mengandung masukan dari LSM. Walaupun undang-undang tersebut belum ada, AJI melaporkan bahwa tidak ada masalah untuk memperoleh dokumen publik yang bukan rahasia dari pemerintah. Pengecualian terhadap aturan ini hanya di Aceh, di mana informasi hanya bisa diperoleh dari Pusat Media TNI.

Tidak ada pembatasan secara hukum terhadap peranan perempuan dalam politik. Seorang perempuan, Megawati Soekarnoputri memegang jabatan sebagai Presiden sampai bulan Oktober, saat Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden; namun, di bawah Presiden Megawati, perempuan hanya ada 2 dari 33 Menteri Kabinet dan 8 dari 45 Hakim Mahkamah Agung. Pada tanggal 20 Oktober, Presiden Yudhoyono mengangkat perempuan untuk menduduki 4 dari 36 kursi kabinetnya. Dalam bulan Februari 2003, DPR mengesahkan undang-undang pemilihan umum yang memuat seruan tidak mengikat kepada partai-partai untuk memilih perempuan paling sedikit 30 persen dari kandidat yang ada pada daftar partai mereka. Dalam pemilihan tahun ini, 61 perempuan telah dipilih diantara 550 kursi di DPR, suatu peningkatan dari 1999, saat 44 perempuan memegang kursi di antara 500 kursi di DPR. Di DPD, ada 27 perempuan dari 128 anggota.

Tidak ada pembatasan secara hukum terhadap peranan minoritas di dalam politik. Ada 365 anggota minoritas (didefinisikan sebagai orang-orang dari luar pulau Jawa dan Madura) di antara 500 kursi anggota di DPR. Tidak ada statistik untuk DPR 2004-2009. Ada 12 anggota minoritas di dalam kabinet Megawati yang beranggotakan 33 orang. Sebagian besar anggota kabinet Megawati adalah orang Jawa, Sunda, atau Madura, dan anggota minoritas adalah orang Bugis, Batak, Aceh, Minang, Flores, Bali, Banjar, Arab atau keturunan Cina. Kabinet Presiden Yudhoyono juga terdiri atas unsur-unsur pluralitas yang terbanyak orang Jawa, dengan yang lain-lain dari Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Papua, Bali, Arab, atau keturunan Cina.

Di Papua, rencana pemerintah untuk membagi propinsi tersebut menjadi tiga, terus menghasilkan pertentangan yang signifikan dari LSM, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, dan Gubernur Papua. Perundang-undangan menghendaki agar dibentuk 2 propinsi tambahan, yaitu Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Namun, undang-undang Otonomi Khusus 2001 di Papua yang disahkan kemudian menjelaskan bahwa pemisahan hanya mungkin bilamana ada persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan badan legislatif Papua. Namun demikian, pemerintah membentuk Propinsi Irian Jaya Barat, walaupun menunda pembentukan Irian Jaya Tengah. Pada tanggal 11 Nopember, Pengadilan Konstitusional membatalkan undang-undang 1999 yang memisahkan Papua menjadi tiga propinsi tetapi memutuskan bahwa Irian Jaya Barat bisa tetap berdiri,

karena telah berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam bulan Desember, Presiden Yudhoyono mengeluarkan suatu keputusan yang menyetujui pembentukan Dewan Rakyat Papua yang terdiri atas 40 anggota. Dewan tersebut bisa memberikan masukan kepada pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Propinsi Papua, maupun kepada perundang-undangan tingkat propinsi yang mempengaruhi orang Papua pribumi. Dewan tersebut akan terdiri atas sepertiga tokoh agama, sepertiga wakil dari organisasi kesukuan, dan sepertiga dari kelompok perempuan. Namun, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan veto atas para calon untuk MRP yang dianggapnya tidak dapat disetujui.

Bagian 4 Sikap Pemerintah Terhadap Investigasi Internasional dan Non-Pemerintah Tentang Dugaan Kekerasan Terhadap Hak Asasi Manusia

Organisasi hak asasi manusia domestik melaporkan bahwa mereka terkena pemantauan, gangguan, dan campur tangan oleh Pemerintah; namun, mereka tetap aktif dalam mengadvokasi perbaikan terhadap kinerja hak asasi manusia Pemerintah. Komnas HAM melaporkan bahwa, sejak tahun 2000, 14 aktivis hak asasi manusia telah dibunuh dan bahwa para pelaku tidak ada yang diadili. Namun, tidak ada laporan tentang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh dalam tahun ini. Banyak LSM, khususnya yang di Aceh, menuduh satuan keamanan menghambat kegiatan mereka. Tidak seperti dalam tahun yang lalu, tidak ada laporan bahwa kelompok-kelompok terorganisir menyerang anggota atau kantor LSM.

Di Aceh, LSM mengalami campur tangan yang kuat dari pemerintah. Satuan keamanan berulang kali memanggil para aktivis LSM untuk ditanyai tentang kemungkinan hubungan dengan GAM, yang mendorong antara 100 dan 200 aktivis meninggalkan propinsi tersebut. Pemerintah secara efektif melarang para pekerja bantuan kemanusiaan asing, kecuali sejumlah terbatas yang terkait dengan organisasi PBB. Menurut AI, setelah Gubernur Propinsi mengambil alih sebagai kepala Penguasa Darurat Sipil, ia memperluas pembatasan terhadap organisasi kemanusiaan internasional. Dilaporkan bahwa akses adalah sangat buruk di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh militer sebagai "daerah hitam". AI yakin bahwa beberapa dari daerah tersebut tidak diakses oleh organisasi kemanusiaan independen sejak bulan Mei 2003.

Pemerintah mengkritik LSM yang mempertanyakan kebijakan-kebijakannya. Dalam bulan Juni, Pemerintah yang terdahulu mengeluarkan Sidney Jones, ICG Country Director. Jones tampaknya dikeluarkan karena ketidaksenangan pemerintah terhadap penggambarannya atas penanganan isu-isu yang secara politik sensitif. (lihat Bagian 2.d.).

Pada tanggal 30 Juni, pengadilan memberikan keputusan yang menguntungkan kepada Mayor Jenderal Nurdin Zainal, yang dalam tahun 2003 telah menuntut dua orang dari LSM Lembaga untuk Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELS-HAM) dan empat redaktur harian karena memfitnah. Tuntutan tersebut berasal dari suatu konferensi pers ELS-HAM yang diselenggarakan segera sesudah suatu penyerangan di dekat Timika dalam tahun 2002. ELS-HAM naik banding terhadap keputusan tersebut.

Tidak ada kemajuan dalam kasus enam anggota FBR yang terlibat dalam suatu penyerangan tahun 2002 terhadap para aktivis dari Konsorsium Orang Miskin Urban di Kantor Komnas HAM Jakarta. Keenam kasus masih tetap dalam status naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada akhir tahun. Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam menuntut para pelaku dari penembakan di Papua dalam tahun 2002 terhadap beberapa anggota keluarga Johannes Bonay, direktur eksekutif ELS-HAM.

Pada umumnya, pemerintah melihat investigasi luar atau kritik asing terhadap catatan hak asasi manusianya sebagai campur tangan urusan dalam negeri. Satuan keamanan dan organisasi intelijen cenderung mencurigai organisasi hak asasi manusia asing, khususnya yang beroperasi di daerah konflik. Pemantauan pemerintah terhadap orang asing tampak nyata di beberapa daerah konflik. Beberapa organisasi hak asasi manusia domestik menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan konsekuensi bilamana menghubungi orang asing.

Sejumlah instansi pemerintah dan badan-badan afiliasinya menangani masalah hak asasi manusia, termasuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Pemberdayaan Perempuan, dan Komnas HAM. Namun demikian, dalam tahun 2003, usaha Komnas HAM untuk mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggung jawaban para pelakunya telah dirusak oleh sejumlah keputusan pengadilan tentang yurisdiksi atau wewenang Komnas HAM. Misalnya, dalam bulan Juni 2003, satu pengadilan negeri di Jakarta menolak untuk memanggil secara tertulis para purnawirawan perwira militer dan yang masih aktif, yang telah mengabaikan panggilan Komnas HAM untuk

ditanyai mengenai kerusuhan 1998, yang telah memakan lebih dari 1.200 jiwa. Menurut undang-undang, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum tahun 2000, hanya dapat diinvestigasi oleh suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, dan bukan oleh Komnas HAM. Pengadilan tersebut dapat dibentuk hanya atas usul DPR, tetapi agar DPR mengetahui cukup banyak tentang suatu insiden untuk dapat menyetujui pembentukan suatu pengadilan, diperlukan suatu investigasi yang seksama. Jalan buntu yang diakibatkannya terus menghalangi kemajuan terhadap pertanggung jawaban.

Bagian 5 Diskriminasi, Pelanggaran Komunal , dan Perdagangan Orang

Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jender, ras, cacat, bahasa, atau status sosial. Undang-undang tersebut menetapkan persamaan hak bagi semua warga, baik penduduk asli maupun yang dinaturalisasi. Namun, dalam praktek, pemerintah gagal untuk membela hak-hak tersebut secara memadai.

Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan masih didokumentasi secara buruk. Tidak tersedia angka-angka untuk seluruh negara, tetapi LSM Mitra Perempuan yang berafiliasi dengan Women's Crisis Centers (WCC) melakukan suatu survei di 13 kota mulai April 2003 sampai Maret. WCC menemukan 300 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta, 33 di Bandung, 14 di Purwokerto, 25 di Surakarta, 53 di Jombang, 14 di Banda Aceh, 22 di Bengkulu, 25 di Bandar Lampung, 10 di Palembang, 7 di Pontianak, 10 di Manado, 30 di Makassar, dan 32 di Kupang. Pers setempat melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Dua jenis pusat krisis tersedia bagi perempuan yang diperlakukan dengan kejam: pusat-pusat krisis yang dikelola pemerintah di rumah sakit dan pusat-pusat krisis LSM yang dioperasikan di dalam masyarakat. Selama tahun ini Departemen Pemberdayaan Perempuan secara berhasil telah melakukan lobi bagi pengesahan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengajukan rencana undang-undang anti-perdagangan orang ke DPR, dan mendukung sasaran undang-undang pemilihan umum yaitu 30 persen calon perempuan bagi jabatan legislatif. Departemen tersebut juga bekerja untuk isu-isu perlindungan anak termasuk perdagangan anak.

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan oleh DPR pada tanggal 14 September menetapkan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan kriminal. Kekerasan fisik dapat dihukum penjara sampai 15 tahun atau denda US\$ 5.000 (Rp. 45 juta). Kekerasan psikologis dapat dihukum penjara sampai 3 tahun atau denda US\$ 1.000 (Rp. 9 juta). Kekerasan seksual dapat dihukum penjara sampai 20 tahun. Pada akhir tahun tidak ada penuntutan.

Perkosaan merupakan suatu masalah. Tindakan tersebut dapat dihukum 4 sampai 12 tahun penjara. Walaupun pemerintah memenjarakan para pelaku perkosaan dan percobaan perkosaan, paling umum para pemerkosa yang dihukum memperoleh hukuman paling minimum atau kurang. Statistik di seluruh negara yang dapat diandalkan tidak tersedia. Definisi perkosaan adalah sempit dan tidak mencakup tindakan sangat kejam yang biasanya diperlakukan sebagai tindak perkosaan di negara-negara lain.

Perkosaan oleh anggota satuan keamanan paling banyak terjadi di Aceh. Para aktivis hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran bahwa perkosaan kurang dilaporkan di Propinsi tersebut, sebagian karena keengganan para korban untuk melakukannya.

SIRA menyatakan bahwa personil militer melakukan 9 perkosaan di Aceh tetapi tidak ada kasus perkosaan atau pelecehan seksual yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Selama tahun ini, TNI menuntut 15 personil atas dakwaan perkosaan.

Tidak jelas apakah pemberontak GAM melakukan perkosaan selama tahun ini, walaupun banyak laporan bahwa para anggota GAM melakukan perkosaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selama beberapa tahun yang lalu, banyak pos polisi mendirikan "ruang pelayanan khusus", dimana para petugas polisi perempuan menerima laporan kriminal dari korban penyerangan seksual dan perdagangan orang, dan dimana korban dapat memperoleh tempat perlindungan sementara.

Garis Besar Kebijakan Negara, yaitu ketentuan hukum yang diadopsi oleh MPR, menyatakan bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun, garis besar tersebut juga menyatakan bahwa partisipasi perempuan di dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan

dengan peranan mereka di dalam memperbaiki kesejahteraan keluarga dan pendidikan generasi muda. Undang-Undang Perkawinan menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Perempuan di banyak wilayah dari negara ini, khususnya di Papua, mengeluh tentang perlakuan yang berbeda berdasarkan gender.

Perbedaan hukum antara seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan tidaklah jelas. Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia kawin minimum adalah 16 tahun untuk seorang perempuan (dan 19 tahun untuk laki-laki), tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang di bawah usia 18 tahun adalah anak-anak.

Mutilasi alat kelamin perempuan (FGM), yang juga dikenal sebagai penyunatan perempuan, dipraktikkan di beberapa daerah di negara ini, termasuk Jawa Barat. Data paling baru yang tersedia, dari suatu studi tahun 2002 di daerah-daerah dimana FGM adalah lazim, mengindikasikan bahwa tingkat kesakitan, penderitaan, dan komplikasi adalah minimum. Dua macam praktek, yaitu bidan dan praktisi tradisional setempat, melaksanakan prosedur penyunatan tersebut. Para peneliti mengatakan bahwa yang dilakukan bidan termasuk penyobekan, pemotongan, atau penusukan sebagian dari alat kelamin tetapi tidak pembuangan jaringan. Di pihak lain, sebagian besar praktisi tradisional setempat mengatakan bahwa biasanya mereka membuang jaringan, tetapi banyaknya pembuangan ini tetap tidak jelas. Demikian juga, tidak jelas apakah pembuangan jaringan adalah dari clitoris, labia minora, atau tempat lain. Beberapa aktivis LSM menolak tuduhan mutilasi, dengan mengatakan bahwa ritual sebagaimana dipraktikkan di negara ini sebagian besar adalah simbolis. Selama tahun ini Departemen Kesehatan dan Departemen Pemberdayaan Perempuan menjadi lebih terlibat dalam pencegahan FGM serta prakteknya oleh bidan di klinik-klinik. Pada Bulan Juni 2005, Departemen Kesehatan, World Health Organization, dan Ford Foundation merencanakan untuk mensponsori usaha-usaha mensensitifkan dan membagi informasi tentang status dari praktek FGM dan untuk memobilisasi usaha pencegahan dengan masyarakat agama, pengacara LSM dan para pelayan medis. Departemen Kesehatan terus bekerja, tetapi tidak menghasilkan suatu pernyataan kebijakan resmi yang melarang FGM untuk dipraktikkan di klinik-klinik pemerintah oleh para pemberi pelayanan perawatan kesehatan. Departemen Kesehatan memasukkan pencegahan FGM sebagai suatu mata pelajaran di dalam kurikulum pelatihan bagi para pemberi pelayanan kelahiran tradisional dan bidan.

Prostitusi tidak secara khusus dikemukakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, undang-undang tersebut mengacu kepada "kejahatan terhadap kesusilaan/ moral", yang dapat ditafsirkan sebagai berlaku bagi prostitusi. Prostitusi anak adalah ilegal di bawah Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak 2002. Meskipun bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan agama, prostitusi banyak terjadi dan ditolerir secara luas. Dilaporkan bahwa satuan keamanan berpartisipasi dalam menjalankan rumah pelacuran atau pemerasan untuk perlindungan, yang melindungi rumah pelacuran dari tuntutan. Pariwisata seks internasional juga terjadi, khususnya di pulau Batam dan Karimun, keduanya di dekat Singapura.

Pelecehan seksual bertentangan dengan undang-undang. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, pelecehan seksual dapat ditindak di bawah Undang-Undang Kriminal. Menurut suatu pernyataan dalam tahun ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 90 persen perempuan dan 25 persen laki-laki telah menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja.

Perceraian terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Orang Muslim yang ingin bercerai pada umumnya pergi ke sistem pengadilan keluarga berbasis Islam sebagai suatu alternatif yang lebih cepat dan lebih murah daripada sistem pengadilan nasional. Non-Muslim memperoleh perceraian melalui sistem pengadilan nasional. Disebabkan oleh sikap yang merugikan, perempuan sering menghadapi beban yang jelas lebih berat daripada laki-laki, khususnya di dalam sistem pengadilan keluarga. Walaupun Pengadilan Islam dan Nasional dapat memberikan tunjangan kepada mantan istri, banyak perceraian tidak memberikan tunjangan kepada mantan istri, karena tidak ada sistem untuk mengawasi pemberlakuan pembayaran tersebut. Laki-laki dan perempuan masing-masing tetap memiliki harta milik sendiri yang mereka miliki sebelum perkawinan. Kalau tidak ada persetujuan pra-perkawinan, maka hak milik bersama dibagi dua sama rata. Undang-Undang Perkawinan mewajibkan seorang perempuan yang telah bercerai untuk menunggu suatu jangka waktu tertentu sebelum menikah kembali, sementara seorang laki-laki dapat segera menikah kembali.

Undang-Undang Kewarganegaraan menetapkan bahwa kewarganegaraan seorang anak semata-mata diperoleh dari ayahnya. Anak-anak dari ibu warganegara Indonesia dan ayah asing dianggap sebagai orang asing dan harus mempunyai visa untuk menetap di dalam negeri sampai pada usia 18 tahun, saat mana

mereka dapat memohon kewarganegaraan. Anak-anak tersebut dilarang untuk memasuki sekolah-sekolah publik. Dalam hal seorang ibu warganegara Indonesia tinggal di luar negeri dengan suami orang asingnya, maka perceraian dapat menimbulkan masalah pengasuhan anak. Anak-anak dari perempuan asing yang kawin dengan laki-laki warganegara juga menghadapi kesulitan. Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang laki-laki warganegara dapat memperoleh kewarganegaraannya setelah 1 tahun, bila diinginkan.

Selama tahun ini, Pemerintah terus melaksanakan Syari'a di Aceh (lihat Bagian 2.c.). Dampak yang paling kelihatan terhadap hak-hak perempuan tampaknya adalah pemberlakuan aturan berpakaian.

Perempuan menghadapi diskriminasi yang besar di tempat kerja, baik dalam artian memperoleh jabatan atau dalam memperoleh kompensasi yang adil bagi pekerjaan yang dilakukannya. Dalam tahun 2003, International Labor Organization (ILO) kantor Jakarta melaporkan bahwa secara rata-rata, penghasilan perempuan adalah 68 persen dari penghasilan pekerja laki-laki. Dalam tahun 2002, Pemerintah menyatakan bahwa 14 persen pegawai negeri mempunyai jabatan dengan wewenang, tetapi hanya 38 persen dari seluruh pegawai negeri adalah perempuan, yang berarti bahwa hanya 5 persen pegawai negeri yang mempunyai jabatan dengan wewenang adalah perempuan.

Beberapa aktivis mengatakan bahwa, dalam bidang manufaktur para pengusaha menurunkan perempuan pada suatu tingkat pembayaran yang lebih rendah, dan pekerjaan dengan tingkat yang lebih rendah. Banyak pekerja pabrik perempuan dipekerjakan sebagai pekerja harian dan bukan sebagai pegawai permanen penuh waktu, dan perusahaan tidak diwajibkan untuk memberikan tunjangan, seperti cuti hamil, kepada pekerja harian. Menurut Biro Statistik Pusat Pemerintah, dalam tahun 2002, angka pengangguran lebih tinggi untuk laki-laki daripada perempuan. Bilamana seorang suami dan istri kedua-duanya bekerja pada suatu instansi pemerintah, maka tunjangan kepala rumah tangga diberikan kepada suami. Ada laporan bahwa perempuan lulusan universitas menerima suatu gaji rata-rata 20 persen lebih rendah daripada rekan laki-laki mereka.

Sejumlah organisasi mempromosikan hak perempuan atau mengemukakan isu perempuan selama tahun ini, termasuk Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LBH-Apik, dan International Catholic Migration Commission (ICMC).

Masalah Anak

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap hak-hak, pendidikan, dan kesejahteraan anak; tetapi tidak cukup mencurahkan sumber daya untuk memenuhi komitmen tersebut. Dalam praktek, sebagian besar sekolah tidak bebas biaya, dan kemiskinan membuat pendidikan tidak dapat dijangkau oleh banyak anak-anak. Pekerja anak dan pelanggaran seks merupakan masalah yang serius. Walaupun anak perempuan dan anak laki-laki sepertinya menerima peluang pendidikan yang sama, anak laki-laki lebih berkemungkinan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dalam bulan Januari 2003, pemimpin dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengidentifikasi bahwa masalah paling mengkhawatirkan yang berkaitan dengan generasi muda negara ini adalah pekerja anak, perdagangan anak, pelacuran anak, anak jalanan, anak di daerah konflik, dan anak yang kekurangan gizi. Undang-Undang Perlindungan Anak Nasional mencantumkan eksploitasi ekonomi dan seks terhadap anak maupun adopsi, perwalian, dan masalah-masalah lain; namun, beberapa pemerintah daerah tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut.

Anak-anak merupakan korban di daerah-daerah konflik bersenjata. Di Maluku, menyusul peringatan ulang tahun gerakan RMS dalam bulan April, seorang yang tidak dikenal menembak seorang anak umur 9 tahun di Ambon. AI melaporkan bahwa dalam bulan Mei, TNI menggunakan anak-anak, istri dan keluarga lain anggota GAM dari tiga desa yang berbeda sebagai perisai manusia. Mereka diperintahkan oleh para prajurit TNI untuk memegang kantong beras di depan diri mereka sebagai perisai dan berjalan melalui hutan di depan para prajurit yang mencari anggota GAM. Operasi tersebut berlangsung dari tanggal 16 Mei sampai 18 Mei. Menurut AI, TNI juga menggunakan anak-anak untuk memata-matai, memasak, membersihkan, dan berkomunikasi. LSM setempat melaporkan kepada AI bahwa GAM juga menggunakan anak-anak dengan memaksa mereka untuk bertindak sebagai informan, berpartisipasi dalam pembakaran, mengumpulkan "pajak", memasak, dan menyediakan perbekalan. Di samping itu, dilaporkan bahwa GAM menggunakan anak-anak belasan tahun sebagai pejuang.

hotline kesejahteraan anak yang baru dibuat oleh polisi, mencatat sejumlah 576 kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur dalam 3 bulan pertama tahun ini. Peningkatan kasus yang dilaporkan kemungkinan

merupakan hasil dari mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan baru, dan bukan pencerminan dari peningkatan yang dramatis dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang aktual. Polisi menerima laporan-laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran.

Menurut undang-undang, anak-anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar 6 tahun dan 3 tahun pendidikan menengah pertama; namun, dalam praktek, Pemerintah tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Menurut data UNICEF tahun 2002, persentase anak yang bersekolah adalah 96 persen anak-anak usia 7 sampai 12 tahun, 79 persen yang berusia 13 sampai 15 tahun, dan 49 persen usia 16 sampai 18 tahun.

Uang sekolah bulanan bagi sekolah negeri bervariasi dari satu propinsi ke propinsi lain berdasarkan rata-rata penghasilan. Beberapa orang tua masih kesulitan untuk bisa mengirim anak-anaknya ke sekolah. Termasuk uang sekolah, biaya transport, dan peralatan sekolah, maka sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat menghabiskan biaya antara US\$ 444 dan US\$ 778 (Rp. 4 juta sampai Rp. 7 juta) setiap tahun untuk setiap siswa dari satu keluarga. Tidak jelas berapa banyak anak-anak terpaksa meninggalkan sekolah untuk membantu keluarga mereka. Di beberapa daerah, orang tua dan kelompok pengawas mengeluh bahwa korupsi di antara pegawai negeri sangat merusak mutu pendidikan. Indonesia Corruption Watch melaporkan bahwa beberapa kepala sekolah di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara menyuap para pejabat Departemen Pendidikan untuk menjamin pendanaan bagi sekolah mereka.

Selama tahun ini, konflik atau dampak yang melekat dari konflik, mengganggu pendidikan dari sejumlah anak. Misalnya, selama konflik sektarian yang baru di Ambon, Maluku, dua sekolah Islam telah dihancurkan dan beberapa yang lain ditutup untuk sementara karena kondisi yang tidak aman. Di Propinsi Aceh, lebih dari 603 gedung sekolah telah dibakar menyusul pemberlakuan darurat militer dalam bulan Mei 2003. Pemerintah membangun kembali 328 dari sekolah-sekolah tersebut dalam tahun ini, namun, beberapa ratus sekolah telah dihancurkan oleh tsunami tanggal 26 Desember.

Banyak anak-anak tumbuh dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kekurangan gizi tetap merupakan masalah yang serius. Angka kematian bayi di negara ini masih tetap tinggi. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dipublikasikan dalam bulan Desember 2003, terdapat 35 kematian untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Kematian balita menurun, tetapi tidak ada pengurangan kematian bayi, sehingga pemerintah meningkatkan perhatiannya pada perawatan kesehatan anak yang baru lahir.

Jumlah anak jalanan di seluruh negara tidak diketahui. Komnas PA memperkirakan 50.000 secara nasional, sementara penelitian Family Health International tahun 2002 memperkirakan angka yang hampir mencapai 71.000. Selama tahun ini, satu LSM memperkirakan bahwa jumlah anak jalanan di 12 kota terbesar telah sedikit menurun.

Populasi anak jalanan dalam jumlah besar tampak di Jakarta dan propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Surabaya di Jawa Timur merupakan tempat tinggal dari kira-kira 8.000 anak jalanan dan banyak dilaporkan rentan terhadap pelanggaran dan kekerasan seksual. Kira-kira 40 tempat perlindungan di propinsi ini memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut. Dalam bulan Agustus 2003, Pemerintah Kota Jakarta mengumumkan akan mendirikan sebuah perumahan asrama untuk 600 sampai 1.000 anak jalanan. Pemerintah kota juga setuju untuk membayar pendidikan anak tersebut dan memberikan beasiswa sebesar kira-kira US\$ 58 (Rp. 522 ribu rupiah) kepada orang tua anak-anak untuk membantu mereka mendirikan usaha di rumah. Tempat perlindungan tersebut belum dibuka sampai pada akhir tahun. Pemerintah terus menyediakan beberapa tempat perlindungan di seluruh negara, yang dikelola oleh LSM setempat, dan membayar untuk pendidikan beberapa anak jalanan. Satu LSM memperkirakan bahwa 5.000 anak tinggal di tempat-tempat perlindungan tersebut. Selama tahun ini, Pemerintah memberikan US\$ 1 juta (Rp. 9 milyar) untuk mengurangi masalah anak jalanan di Bandung, Jawa Barat, tetapi program tersebut tidak berhasil, yang menurut laporan disebabkan oleh korupsi.

Eksplotasi seks komersial terhadap anak-anak terus merupakan masalah yang serius. Jumlah pekerja seks anak di negara ini tidak jelas, namun, perkiraan ILO memperkirakan bahwa ada kira-kira 21.000 pekerja seks anak di pulau Jawa. Dalam bulan Oktober 2003, satu tim para pejabat kesehatan dan LSM dan mengunjungi sebuah kompleks prostitusi di Propinsi Riau dan memperkirakan bahwa 30 sampai 40 persen dari 365 pekerja seks perempuan di tempat itu berusia di bawah 18 tahun. Banyak anak perempuan belasan tahun dipaksa untuk memasuki atau terperangkap dalam jebakan hutang. Dari waktu ke waktu, para pejabat penegak hukum memperlakukan pekerja seks anak sebagai kriminal daripada korban. Para aktivis hak perempuan dan

kelompok-kelompok agama menuduh pejabat pemerintah termasuk polisi dan tentara, mengoperasikan atau melindungi rumah pelacuran yang mempekerjakan pekerja seks di bawah umur. Pegawai negeri yang korup mengeluarkan kartu identitas kepada anak-anak perempuan di bawah umur, sehingga mereka dapat memasuki perdagangan seks. Menurut Departemen Sosial Surabaya, dari 6.703 pekerja seks di kota tersebut dan sekitarnya, 30 persen di antara mereka berusia di bawah 18 tahun. Terdapat juga laporan tentang eksploitasi seksual anak laki-laki. Beberapa LSM melaporkan jaringan pedofili aktif yang telah lama beroperasi di Bali, dan pihak yang berwenang menahan, mengadili, dan menghukum paling sedikit seorang laki-laki, yaitu seorang Australia, karena melakukan pedofilia di sana.

Selama tahun ini, terdapat kasus-kasus di mana para perantara kerja membayar orang tua uang muka dari gaji masa depan yang akan dihasilkan oleh anak perempuan mereka. Anak tersebut diwajibkan untuk membayar kembali para perantara kerja tersebut. Para peneliti menggambarkan suatu "kebudayaan prostitusi" di beberapa bagian negara ini, di mana orang tua mendorong anak perempuan mereka untuk bekerja sebagai pekerja seks di kota besar dan mengirim penghasilannya ke rumah.

Para pengamat LSM mengatakan bahwa banyak anak perempuan dipaksa untuk melakukan prostitusi setelah kegagalan perkawinan yang mereka masuki saat berusia 10 sampai 14 tahun. Tidak ada pelanggaran hukum yang jelas karena surat keterangan mereka menyatakan mereka sebagai orang dewasa berdasar fakta bahwa mereka sudah pernah kawin.

Penganiayaan anak dilarang oleh undang-undang, tetapi usaha pemerintah untuk memerangi kekejaman terhadap anak tersebut biasanya lamban dan tidak efektif. LSM-LSM melaporkan bahwa perlu memakan waktu yang sangat lama untuk membawa kasus perkosaan anak ke pengadilan, dan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan kekejaman terhadap anak tidak jelas.

Pekerja anak merupakan sebuah masalah. Dalam bulan Januari 2003, ILO melaporkan bahwa 8 juta anak di bawah usia 18 tahun melakukan pekerjaan orang dewasa (lihat Bagian 6.d.).

Selama tahun ini, Pemerintah mulai melaksanakan sebuah undang-undang tahun 1997 tentang peradilan anak remaja 1997 menuntut dibentuknya suatu sistem pengadilan anak remaja. Di kota-kota dimana suatu pengadilan anak remaja belum dibentuk, maka pengadilan biasa yang memutuskan kasus-kasus tersebut. Pada tanggal 13 Agustus, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, meresmikan pengadilan anak remaja yang pertama di negara ini di Bandung, Jawa Barat. Komnas PA melaporkan bahwa lebih banyak pengadilan mulai melibatkan pekerja sosial dalam persidangan anak tetapi hambatan keuangan membuat para pekerja sosial tersebut tidak bisa tersedia di semua pengadilan.

Sejumlah LSM mempromosikan hak anak, termasuk Jaringan Advokasi Anak, Komisi Nasional untuk Perlindungan Anak, Pusat Studi dan Perlindungan Anak, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.

Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah ilegal menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak 2002; namun, undang-undang tersebut tidak komprehensif dalam definisi perdagangannya. Selama tahun ini, orang-orang diperjualbelikan ke, dari, dan di dalam negeri untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa, termasuk misalnya karena jeratan hutang.

Dalam tahun 2002, Sebuah rencana aksi nasional untuk menghadapi perdagangan perempuan dan anak disetujui dengan keputusan Presiden. Rencana tersebut menyebutkan dengan jelas peran khusus pemerintah dan masyarakat sipil pada tingkat nasional dan daerah, dan mencakup sasaran untuk pembuatan undang-undang dan penegakan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak-anak serta perdagangan anak. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa hukuman pidana berat dan lamanya hukuman penjara bagi orang-orang yang melanggar hak anak-anak termasuk perdagangan orang. Selama tahun ini, Pemerintah menyelesaikan rancangan undang-undang anti-perdagangan yang komprehensif, dan Presiden Megawati menyerahkan rencana undang-undang tersebut kepada DPR dalam bulan Agustus. Pemerintah, dengan bantuan LSM, melakukan usaha pendidikan publik tentang perdagangan orang. Dalam bulan Januari, Propinsi Sulawesi Utara memberlakukan peraturan daerah Anti Perdagangan Orang tingkat propinsi pertama di negara ini. Pada tanggal 30 September, DPR mengesahkan Undang-undang perlindungan pekerja migran dan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memiliki definisi hukum yang cukup tentang perdagangan orang. Solidarity Center dan ICMC mengidentifikasi undang-undang yang dapat diterapkan dalam hal perdagangan orang dan pelanggaran yang terkait. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang perdagangan perempuan dan laki-laki di bawah umur tetapi tidak menyebutkan apapun tentang perempuan di bawah umur. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hukuman penjara 3 sampai 15 tahun ditambah denda bagi para pedagang anak. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa penuntut terus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap orang yang memperjualbelikan anak karena mereka kurang mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang masih relatif baru. Namun, jumlah tuntutan berdasarkan undang-undang tersebut meningkat. Di waktu lampau, para hakim jarang menghukum para pelaku lebih dari 3 tahun penjara. Namun, tahun ini para hakim semakin memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku perdagangan anak, antara 5 tahun atau 6 tahun penjara. Pada tanggal 16 September, Pengadilan Sumatera Utara memutuskan hukuman 13 tahun penjara bagi Desi Prisanti Siregar karena menjual 9 perempuan muda dan anak perempuan ke dalam perdagangan seks di Malaysia.

Jumlah resmi dari orang yang diperdagangkan tidak tersedia. Penelitian Solidarity Center dan ICMC memperkirakan antara 2,4 dan 3,7 juta perempuan dan anak-anak yang bekerja dalam kategori yang rentan, seperti pekerja migran, pekerja seks dan pekerja anak dalam rumah tangga (lihat Bagian 5, Anak). Di dalam kategori tersebut total jumlah anak-anak yang diperkirakan antara 254.000 sampai 422.000. Ini bukan merupakan perkiraan korban, tetapi perempuan dan anak-anak yang rentan diperjualbelikan.

Selama tahun ini, Pemerintah, LSM, dan media melaporkan bahwa perempuan diperdagangkan ke Malaysia, Jepang, Timor Tengah (termasuk Arab Saudi dan Kuwait), Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan tempat tujuan lain. Malaysia, berdasarkan dokumen yang dapat dipercaya, merupakan tempat tujuan dengan jumlah kasus korban perdagangan perempuan terbesar.

Selama periode 12 bulan yang berakhir dalam bulan Pebruari, polisi menyelidiki 125 kasus perdagangan perempuan dan anak, yang melibatkan 160 pelaku dan 85 korban. Polisi menyerahkan 67 dari kasus tersebut untuk penuntutan. Paling tidak 25 tersangka telah dihukum. Selama tahun ini, berdasarkan data awal, vonis untuk kasus perdagangan orang meningkat sampai kira-kira 35 hukuman. .

Dalam bulan Juni dan Juli, polisi menahan enam pelaku yang diidentifikasi sebagai kelompok Rizal, yang dilaporkan bertanggung jawab terhadap penjualan ratusan perempuan untuk dijadikan pekerja seks di Malaysia. Pengadilan di Jakarta memutuskan keenam anggota kelompok tersebut bersalah dalam bulan Nopember, tetapi memberi hukuman hanya 4 sampai 5 bulan penjara.

Kota Singkawang di Kalimantan Barat masih terkenal sebagai daerah asal perekrutan perempuan dan remaja perempuan usia 14 dan 20 tahun etnis keturunan Cina miskin sebagai pengantin perempuan yang "dipesan melalui pos" untuk orang laki-laki di Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Dalam beberapa kasus, perempuan diperdagangkan untuk pekerjaan seks dan kerja paksa.

Dalam banyak kasus, pelaku perdagangan orang merekrut anak perempuan dan perempuan dengan janji palsu. Taktik adalah menawarkan pekerjaan kepada perempuan muda di daerah pedesaan sebagai pramusaji atau pegawai hotel di wilayah yang jauh, termasuk pulau-pulau tujuan wisata. Setelah mereka yang baru direkrut tiba dan dibuat berhutang pada pemberi kerja, mereka mengetahui bahwa mereka telah dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Banyak korban perdagangan orang rentan terhadap kejahatan ini saat mereka dalam proses menjadi pekerja migran. Banyak agen perekrutan yang tidak sah beroperasi di seluruh negara dan terlibat dalam perdagangan orang dengan berbagai tingkat. Beberapa agen perekrutan yang mempunyai ijin pemerintah juga terlibat dalam perdagangan orang. Agen perekrutan kadang-kadang membebankan biaya berlebihan, yang menyebabkan jeratan hutang dan menempatkan orang-orang untuk bekerja secara ilegal di luar negeri, Hal ini meningkatkan kerentanan para pekerja terhadap perdagangan orang dan perlakuan kejam lainnya.

Kursus dasar 3-bulan yang diterima semua petugas polisi tidak mencakup pelatihan tentang anti-perdagangan orang. Selama tahun ini, organisasi-organisasi internasional terus memberikan pelatihan khusus kepada polisi sehubungan dengan perdagangan orang. Perdagangan orang ditangani Polisi di Bagian Reserse Kriminal (BARESKRIM). Dalam tahun 2003, polisi membentuk unit anti-perdagangan orang yang terpisah, di bawah BARESKRIM yang bertanggung jawab untuk operasional dan koordinasi. Hasilnya adalah bahwa koordinasi di

dalam institusi Kepolisian dan antara polisi dengan departemen lain yang menangani masalah perdagangan orang, telah sedikit meningkat selama tahun ini.

Markas Besar Kepolisian Negara mengeluarkan instruksi baru kepada kepala polisi daerah untuk membongkar jaringan perdagangan, membantu para korban, dan melaporkan kasus ke markas besar nasional. Namun, sumber-sumber yang dapat dipercaya mencatat bahwa anggota satuan keamanan individu terlibat dalam mendirikan dan melindungi tempat pelacuran. Dilaporkan bahwa para pedagang dan pemilik tempat pelacuran membayar uang perlindungan kepada anggota satuan keamanan. Di samping polisi dan tentara, beberapa pejabat pemerintah terlibat dalam perdagangan orang, khususnya dalam membuat dokumen palsu. Kelaziman dan kemudahan untuk memperoleh KTP palsu, yang dapat mendokumentasi anak-anak sebagai orang dewasa, memberikan kontribusi kepada masalah perdagangan orang. Di dalam masyarakat dan Pemerintah, terus ada keengganan untuk mengakui bahwa pelacuran adalah persoalan besar.

LSM-LSM domestik, dengan dukungan internasional, memimpin upaya untuk memantau dan mencegah perdagangan orang, dan seringkali bekerjasama dengan instansi pemerintah. LSM tersebut termasuk Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, LBH-Apik, Kelompok Perlindungan dan Bantuan Perempuan (DERAP), Koalisi Perempuan, dan Solidaritas Perempuan.

Tahun 2003, Pemerintah bekerjasama dengan Australia dalam menyelidiki jaringan perdagangan orang yang mengirim perempuan Indonesia ke dalam jaringan pelacuran di Australia. Kerjasama polisi secara bilateral menghasilkan persidangan dari paling tidak satu orang pelaku perdagangan orang di Australia dan penahanan beberapa lainnya di Indonesia. Pemerintah juga bekerjasama dengan Malaysia untuk menyelidiki perdagangan orang.

Pemerintah di berbagai tingkat dan beragam derajat membantu korban perdagangan orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya bantuan tingkat nasional dan lokal meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih tetap kecil dibandingkan dengan ruang lingkup masalahnya. Secara umum bantuan pemerintah hanya secukupnya dan dipusatkan pada warga negara yang diperjualbelikan di luar negeri, sementara bantuan dalam negeri minimum. Selama tahun ini, Pemerintah dan kelompok masyarakat mendirikan sejumlah tempat penampungan baru bagi para korban perdagangan, termasuk di Batam, Kepulauan Riau. Polisi menambah jumlah ruang pelayanan khusus perempuan, yaitu unit-unit yang dibentuk untuk membantu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang. Ruang pelayanan khusus ini memberikan tempat perlindungan sementara, penanganan polisi secara khusus, dan sedikit pelayanan hukum kepada para korban. Ruang khusus ini kadang-kadang bekerjasama dengan LSM setempat dalam memberikan pelayanan medis dan psikologis serta tempat perlindungan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Namun, ketidakpercayaan kepada polisi mendorong beberapa korban untuk tidak menggunakan bagian tersebut.

Kebijakan Pemerintah adalah untuk “memperlakukan orang yang diperdagangkan tidak sebagai kriminal tetapi sebagai korban yang memerlukan bantuan dan perlindungan”. Selama tahun ini, Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkuat kembali kebijakan ini pada acara publik dan program pelatihan bagi polisi dan para pejabat lain. Namun, pemerintah daerah dan polisi melakukan hal yang beragam, khususnya di pangkat-pangkat yang lebih rendah dari instansi penegakan hukum. Pemerintah daerah, yang memiliki wewenang lebih besar dalam program otonomi negara ini, kadang-kadang menerapkan peraturan yang cenderung memperlakukan para pekerja seks yang diperdagangkan sebagai kriminal, hal yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Di berbagai instansi, pejabat pemerintah dan polisi secara aktif melindungi dan membantu para korban. Dalam kasus yang lain, polisi memperlakukan korban, yang merupakan pekerja seks yang diperdagangkan, sebagai kriminal, menahan mereka dan mengambil keuntungan dari kerentanan mereka untuk meminta suap dan pelayanan seks. Media dan pejabat-pejabat berpangkat lebih rendah, termasuk polisi, kadang-kadang gagal untuk melindungi identitas korban dan biasanya memberikan nama-nama para korban kepada publik.

Pemerintah mendorong korban untuk membantu di dalam menyelidiki dan membawa para pelaku perdagangan orang ke meja hukum. Pemerintah melaporkan bahwa para korban seringkali enggan atau menolak untuk memberikan kesaksian, karena malu dan takut akan pembalasan terhadap mereka atau keluarga mereka.

Para Penyandang Cacat

Undang-undang mengamanatkan adanya akses ke dalam gedung untuk para penyandang cacat; namun, pemerintah tidak melaksanakan ketentuan ini. Undang-Undang Penyandang Cacat mewajibkan perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 pekerja untuk menyisihkan 1 persen dari posisi mereka kepada penyandang cacat. Namun, Pemerintah tidak menjalankan peraturan ini dan para penyandang cacat menghadapi diskriminasi yang besar. Undang-undang juga mengamanatkan akses ke fasilitas publik bagi para penyandang cacat; namun, hanya sangat sedikit gedung dan tidak ada fasilitas transportasi yang secara nyata memberikan akses tersebut. Statistik terakhir tentang jumlah orang penyandang cacat tidak tersedia. Dalam tahun 1999, PBB memperkirakan presentase orang penyandang cacat 5,4 persen dari jumlah populasi, atau kira-kira 12 juta orang; pemerintah menyebutkan angkanya adalah 3 persen, atau kira-kira 7 juta orang. Pemerintah menggolongkan orang penyandang cacat ke dalam 4 kategori: tuna netra, tuna rungu, cacat mental, dan cacat fisik. Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk memelihara mereka, namun, "memelihara" tidak didefinisikan, dan pasal-pasal tentang pendidikan untuk anak-anak cacat tidak pernah disebutkan dalam kewajiban pemerintah tersebut.

Di daerah perkotaan, hanya sedikit bus kota yang menawarkan akses kursi roda, namun banyak pengangkat hidroliknya yang rusak, sehingga tidak dapat lagi digunakan. Dalam kasus lain, tempat yang disediakan bagi pengguna kursi roda di tempati oleh penumpang lain karena kondektur bus dapat menghasilkan uang lebih banyak.

Dalam tahun 2003, Pemerintah menyatakan bahwa di negara ini terdapat 1,3 juta anak-anak cacat, tetapi hanya 50.000 dari mereka yang bersekolah. Diyakini bahwa jumlah anak-anak tersebut yang sebenarnya lebih tinggi. Undang-undang menetapkan hak pendidikan dan perawatan rehabilitasi untuk anak-anak cacat. Seorang pejabat pemerintah menduga bahwa banyak orang tua memilih untuk menempatkan anak-anak cacat mereka di rumah; namun, banyak sekolah menolak untuk menerima anak-anak tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka kekurangan sumber daya. Menurut Pemerintah, ada 700 sekolah khusus untuk mendidik anak-anak cacat; selain 41 sekolah, semua yang lainnya dikelola oleh swasta. Beberapa anak muda penyandang cacat memilih mengemis sebagai mata pencaharian.

Minoritas Nasional/Rasial/ Etnis

Pemerintah secara resmi mempromosi toleransi rasial dan etnis. Etnis Etnis Cina berjumlah kira-kira 3 persen dari jumlah penduduk, yang jelas merupakan kelompok minoritas nonpribumi terbesar, dan memainkan peranan utama di dalam ekonomi. Peristiwa diskriminasi dan gangguan terhadap etnis Cina Indonesia menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 14 April, Presiden Megawati secara publik meminta para pejabat imigrasi untuk berhenti meminta suatu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) kepada warga etnis Cina, yaitu dokumen yang tidak diwajibkan bagi warga bukan keturunan Cina; namun, banyak warga etnis Cina melaporkan bahwa mereka masih seringkali diminta untuk memperlihatkan dokumen tersebut. Seorang pengacara untuk hak etnis Cina menyatakan bahwa lebih dari 60 pasal undang-undang, peraturan, atau keputusan yang berlaku, mendiskriminasi warga etnis Cina. LSM seperti Gerakan Anti-Diskriminasi Indonesia mendesak Pemerintah untuk mencabut pasal-pasal tersebut.

Dalam bulan September 2003, kira-kira 50 keluarga etnis Cina di kota Tangerang, Jawa Barat, berdemonstrasi di depan gedung DPRD Tangerang sehubungan dengan dugaan penjualan tanah yang secara tradisional digunakan sebagai pekuburan Cina. Para keluarga tersebut berkeberatan karena penjualan tanah untuk pembangunan komersial membuat mereka tidak bisa menguburkan kerabat yang meninggal di samping orang-orang yang dicintai. Para anggota dewan perwakilan rakyat daerah setuju untuk meninjau kembali kasus tersebut, tetapi tidak ada perkembangan sampai akhir tahun.

Selama tahun ini, beberapa warga etnis Cina mengeluh karena Pemerintah tidak cukup berupaya untuk menindak orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kekerasan tahun 1998 yang berdampak pada mereka dan bisnis mereka.

Di Papua, pejabat TNI memperkirakan bahwa jumlah gerilyawan OPM adalah 620. Persenjataan para gerilyawan tersebut buruk dengan perkiraan 150 senjata yang berkisar dari M-16 yang modern sampai kepada Mauser yang sudah kuno. Orang asli Papua mengeluh bahwa mereka kurang mendapat tempat dalam posisi pegawai negeri di propinsi tersebut; namun, terutama akibat sebagian pelaksanaan dari Undang-Undang

Otonomi Khusus dan dibentuknya 14 kabupaten baru di Papua, maka terdapat peningkatan besar dalam jumlah jabatan pemerintah bagi orang Papua.

Tidak seperti di tahun 2003, tidak ada laporan tentang diskriminasi terbuka terhadap orang Aceh di luar propinsi mereka. Namun, beberapa orang Aceh melaporkan bahwa mereka tidak merasa nyaman untuk mengatakan, bahwa mereka berasal dari Aceh, karena menghadapi pemeriksaan yang berlebihan saat mereka meninggalkan negara, dan mereka tidak senang dengan kartu identitas mereka yang berbeda.

Penduduk Asli

Pemerintah memandang semua warga sebagai “asli”, dengan pengecualian etnis Cina; namun, Pemerintah mengakui eksistensi dari beberapa “masyarakat terasing” dan hak mereka untuk sepenuhnya ikut serta di dalam kehidupan politik dan sosial. Masyarakat tersebut termasuk kelompok-kelompok seperti banyak sekali Suku Dayak Kalimantan, keluarga yang hidup sebagai pengembara laut, dan 312 kelompok penduduk asli Papua yang diakui secara resmi. Selama tahun ini, penduduk asli masih terkena diskriminasi secara luas, dan hanya ada sedikit perbaikan dalam penghargaan terhadap hak tanah adat mereka. Kegiatan pertambangan dan perkebunan, banyak diantaranya ilegal, merupakan masalah sosial, ekonomi, dan logistik yang signifikan bagi penduduk asli. Pemerintah gagal untuk menghentikan perusahaan domestik dan multinasional, yang sering berkolusi dengan militer dan polisi setempat, untuk melanggar batas tanah penduduk asli.

Di Sumatera, dimana terdapat banyak hutan tropis dataran rendah, kepentingan perusahaan terus mengambil alih tanah yang secara tradisional dinyatakan sebagai hak milik penduduk asli, yang bergantung kepada tanah tersebut untuk bersawah dan penyiapan karet. HRW dan LSM lain melaporkan bahwa pendirian perkebunan yang sangat besar untuk melayani industri kertas dan bubur kertas mengancam mata pencaharian banyak penduduk asli. Beberapa penduduk asli tidak berhasil mengajukan tuntutan tanah terhadap pihak yang berwenang. Tahun 2003, di kecamatan Porsea, Sumatera, penduduk setempat dan kelompok lingkungan, termasuk WALHI, menyalahkan keputusan Pemerintah untuk membuka kembali perusahaan bubur kertas, yaitu PT Toba Pulp Lestari (bekas PT. Indorayon), yang ditutup dalam tahun 2002. Perusahaan tersebut dipersalahkan mencemari lingkungan dengan jangkauan yang jauh, dan paling sedikit 5 orang yang terlibat dalam perselisihan tersebut telah dibunuh dalam tahun-tahun terakhir ini. Komnas HAM mencatat bahwa kedua belah pihak dalam perselisihan tersebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata.

Tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dilaporkan bahwa penduduk asli di Sulawesi tidak melakukan protes terhadap proyek-proyek pembangunan di tanah tradisional mereka.

Di Papua, ketegangan berlanjut antara penduduk asli Papua dengan para pendatang dari propinsi lain, antara penduduk pesisir dengan masyarakat pedalaman, dan di antara suku-suku. Beberapa orang penduduk asli menuduh para pendatang baru melakukan penipuan harga dan merendahkan mereka, sementara beberapa pendatang baru menyatakan bahwa penduduk asli Papua memperlakukan mereka dengan kebencian dan kecurigaan.

Di Kalimantan Tengah, hubungan antara asli Dayak dan transmigran etnis Madura tetap buruk segera sesudah kekerasan antar-etnis tahun 2001. Namun, paling sedikit 45.000 pengungsi etnis Madura kembali ke Kalimantan Tengah selama tahun ini. Hubungan antara kedua kelompok juga tetap buruk di Kalimantan Barat dimana penduduk keturunan Madura dihalangi dalam usaha untuk menuntut kembali hak milik mereka.

Para aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah melanggar hak penduduk asli, mengembangkan kebencian sosial, dan mendorong eksploitasi dan perusakan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup banyak penduduk asli. Di beberapa daerah, seperti bagian-bagian di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, hubungan antara para transmigran dan penduduk asli adalah bermusuhan. Beberapa kelompok asli menyatakan bahwa mereka kurang menerima bantuan pemerintah dibandingkan para transmigran, dan beberapa transmigran menyatakan bahwa dalam beberapa hal mereka dipindahkan ke daerah-daerah dengan tanah yang tidak baik atau dimana kepemilikan tanah sedang dalam perselisihan.

Pelanggaran dan Diskriminasi Kemasyarakatan Lain

Ada sedikit diskriminasi masyarakat terhadap orang-orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Beberapa individu yang memperoleh perawatan dengan penuh kecurigaan di tempat pelayanan kesehatan, melihat bahwa hasil laboratorium mereka yang rahasia dikeluarkan, atau identitas mereka dipublikasi di dalam koran. Pada sebagian besar, bila tidak semua kasus tersebut, Pemerintah gagal untuk mengambil tindakan perbaikan. Namun, Pemerintah mendorong toleransi, mengambil langkah-langkah untuk mencegah infeksi baru, dan menyusun rencana untuk mensubsidi obat-obatan antiretroviral.

Bagian 6 Hak Pekerja

a. Hak Untuk Berserikat

Undang-Undang Perburuhan 2000 menetapkan hak yang luas untuk berserikat bagi pekerja dan pekerja menggunakan hak tersebut. Undang-undang mengizinkan pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih tanpa izin sebelumnya atau persyaratan yang berlebihan, dan pekerja melakukannya di dalam praktek. Undang-undang menetapkan bahwa 10 pekerja atau lebih mempunyai hak untuk membentuk serikat pekerja, dengan keanggotaan yang terbuka bagi semua pekerja, terlepas dari afiliasi politik, agama, etnis, atau jender. Pekerja sektor swasta menurut hukum bebas untuk membentuk organisasi pekerja tanpa persetujuan sebelumnya, dan serikat kerja dapat menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka sendiri serta memilih perwakilan mereka. Pemerintah mencatat, dan bukan menyetujui, pembentukan dari serikat pekerjadan memberinya nomor registrasi. Dengan berdasarkan undang-undang, 86 federasi serikat pekerja memberitahu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang keberadaan mereka. Di samping itu, lebih dari 18.000 unit di tingkat tempat kerja terdaftar di Departemen Tenaga Kerja.

Menurut perkiraan ILO yang dibuat selama tahun ini, jumlah angkatan kerja negara ini terdiri atas kira-kira 100 juta pekerja, 42 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian dan kehutanan. Pemerintah memperkirakan bahwa jumlah keanggotaan serikat pekerja adalah 9,7 juta pekerja, sedikit di bawah 10 persen dari total angkatan kerja. Namun, bila dibandingkan dengan 23,8 juta pekerja resmi di negara ini (kategori yang tidak mencakup mereka yang bekerja sendiri, pekerja lepas, dan pekerja yang tidak dibayar), keanggotaan serikat pekerja mencapai hampir 41 persen.

Undang-undang mengizinkan Pemerintah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan serikat pekerja apabila bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila atau Undang-Undang Dasar, atau bila para pemimpin atau anggota serikat pekerja, atas nama serikat pekerja, melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dihukum paling sedikit 5 tahun penjara. Setelah serikat pekerja dibubarkan, para pemimpin dan anggotanya tidak boleh membentuk serikat pekerja yang lain selama paling sedikit 3 tahun. Tidak ada laporan bahwa pemerintah membubarkan serikat pekerja selama tahun ini.

Dalam bulan Mei, pengadilan di Jakarta menolak semua tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut terhadap para pemimpin dari Serikat Pelaut Indonesia, dan dengan demikian menguatkan hasil pemilihan tahun 2001. Mantan pejabat Departemen Tenaga Kerja, yang memimpin serikat tersebut selama era Suharto, telah meyakinkan jaksa penuntut untuk membatalkan pemilihan tahun 2001 yang tidak sah dan bahwa para mantan pemimpin serikat tersebut harus mendapatkan kembali jabatan pimpinan serikat.

Undang-Undang Perburuhan melarang diskriminasi anti-serikat pekerja oleh pengusaha dan yang lain-lain terhadap para penyelenggara penyelenggara dan anggota serikat, dan menetapkan hukuman bagi pelanggaran; namun, Pemerintah tidak secara efektif memberlakukan undang-undang ini dalam banyak kasus. Sering terdapat laporan yang yang dapat dipercaya tentang sikap pengusaha terhadap para penyelenggara serikat pekerja, termasuk pemecatan dan kekerasan, yang tidak dicegah secara efektif atau diperbaiki dalam praktek. Beberapa pengusaha memperingatkan pekerja terhadap hubungan dengan para penyelenggara serikat. Beberapa serikat pekerja menyatakan bahwa para pemimpin aksi mogok dipilih untuk diberhentikan bilamana perusahaan mengurangi karyawan. Terdapat kewajiban hukum bagi pengusaha untuk menerima kembali pekerja yang dipecat karena kegiatan berserikat, walaupun dalam banyak hal pemerintah tidak memberlakukan hal ini secara efektif.

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia menuduh bahwa pengusaha memecat pengurus serikat dari paling sedikit 5 perusahaan yang diduga disebabkan oleh kegiatan serikat mereka. Dalam bulan Maret, Konfederasi

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengajukan keberatan kebebasan berserikat kepada ILO dalam masalah PD Jaya Bersama, perusahaan di Jakarta yang mengolah sarang burung untuk masakan Cina dan pemecatan terhadap 11 pengurus dan anggota serikat pekerja yang diduga disebabkan oleh kegiatan mereka. Sebagai tanggapan, dalam bulan Mei Departemen Tenaga Kerja melakukan inspeksi tenaga kerja yang menemukan banyak pelanggaran tenaga kerja termasuk pekerja anak, tetapi tidak mengambil tindakan perbaikan. Menurut laporan dari Seafarer Union of Burma (SUB), polisi di Tual, Maluku Utara menahan dan diduga memukul 6 anggota SUB Myanmar karena usaha mereka untuk mengorganisir nelayan Myanmar yang ada di negeri ini. Polisi menyatakan bahwa mereka bertindak karena pelanggaran imigrasi, dan bukan atas permintaan para kapten kapal nelayan Thailand, sebagaimana diduga oleh SUB. Pemerintah mendeportasi keenam pelaut Myanmar itu.

Undang-undang mengakui kebebasan berkumpul dan hak untuk berorganisasi bagi pegawai negeri. Dalam tahun 2002, pegawai dari beberapa departemen mulai membentuk asosiasi pekerja, dan organisasi serikat pekerja mulai mencari anggota. Serikat pekerja juga mencoba untuk mengorganisir para pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), walaupun mereka menghadapi sedikit pertentangan dari manajemen perusahaan, dan dasar hukum untuk mendaftarkan serikat pekerja di dalam BUMN tetap tidak jelas.

b. Hak Untuk Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama

Undang-undang mengizinkan serikat pekerja untuk melakukan kegiatan mereka tanpa campur tangan; namun, Pemerintah kadang-kadang tidak melindungi hak ini di dalam praktek. Undang-undang mengizinkan perundingan bersama dan mengizinkan organisasi pekerja yang terdaftar pada pemerintah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan pengusaha dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi serikat pekerja lainnya. Undang-undang mencakup beberapa pembatasan tentang perundingan bersama, termasuk persyaratan bahwa satu serikat pekerja atau beberapa serikat-merupakan 50 persen dari angkatan kerja perusahaan agar dapat merundingkan Perjanjian Kerja Bersama.

Dalam tahun 2003, DPR mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Undang-Undang Tenaga Kerja), yang mengatur perundingan bersama, hak untuk melakukan pemogokan, dan syarat-syarat kerja umum. Undang-undang tersebut tidak berlaku bagi BUMN. ILO memberikan bantuan teknis dalam pembuatan undang-undang tersebut, yang pada umumnya memenuhi standar ILO. Beberapa serikat pekerja tetap menentang undang-undang tersebut, dengan menyatakan bahwa undang-undang tersebut mengandung tunjangan pesangon yang tidak cukup, perlindungan yang tidak memadai terhadap pemberhentian sewenang-wenang, pembatasan yang tidak tegas terhadap pemberian pekerjaan ke luar perusahaan (outsourcing), dan legalisasi pekerja anak di bawah beberapa persyaratan. Pemerintah terus mengeluarkan keputusan-keputusan pelaksanaan bagi Undang-Undang Tenaga Kerja. Dalam bulan Januari, Presiden menyetujui Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang bersama-sama dengan Undang-Undang Serikat Pekerja tahun 2000 dan Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, merupakan dasar hukum yang direvisi bagi hubungan industri dan hak pekerja. Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan menetapkan sistem yang baru dari pengadilan tenaga kerja tripartit, yang menggantikan komite tripartit sebelumnya. Undang-undang tersebut juga menggaris-bawahi prosedur penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase. ILO memberikan bantuan dalam pembuatan undang-undang ini. Pemerintah belum membentuk sistem pengadilan tenaga kerja yang baru sampai akhir tahun ini.

Menurut Departemen Tenaga Kerja, dalam bulan Juli ada 9.122 Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku antara serikat pekerja dan perusahaan swasta. Peraturan perusahaan, yang diizinkan sebagai bagian dari peraturan pemerintah, mengganti Perjanjian Kerja Bersama di 36.274 perusahaan lain, yang banyak diantaranya tidak memiliki perwakilan serikat pekerja. Di samping itu, dalam tahun 2003 ada 59 perjanjian kerja yang berlaku antara serikat pekerja dan perusahaan negara dan 65 perjanjian lain antara pekerja non-serikat dan perusahaan negara. Undang-Undang Tenaga Kerja mewajibkan pengusaha dan pekerja untuk membentuk badan bipartit (komite gabungan pengusaha/pekerja) di perusahaan dengan 50 pekerja atau lebih, ukuran untuk melembagakan komunikasi bipartit dan pembangunan konsensus. Namun, jumlah badan tersebut tidak meningkat secara signifikan setelah pengesahan undang-undang tersebut.

Semua pekerja, apakah mereka anggota atau bukan anggota serikat pekerja, memiliki hak untuk melakukan pemogokan, kecuali pekerja sektor publik dan mereka yang terlibat dalam kegiatan keselamatan umum. Undang-undang mengizinkan pekerja di dalam kategori yang disebut belakangan untuk melakukan pemogokan bila pemogokan tersebut teratur dan tidak mengganggu kepentingan umum atau membahayakan keselamatan

umum. Pekerja sektor swasta menggunakan hak mereka untuk melakukan pemogokan, sebagaimana juga pekerja di perusahaan negara, walaupun kelompok yang disebut belakangan melakukannya dalam frekuensi yang lebih sedikit. Secara mayoritas pemogokan yang dicatat pemerintah melibatkan pekerja non-serikat. Perwakilan serikat atau pekerja harus menyampaikan pemberitahuan 7 hari sebelumnya untuk melakukan pemogokan secara sah. Undang-undang mewajibkan mediasi oleh para pejabat departemen tenaga kerja setempat tetapi tidak memerlukan persetujuan pemerintah untuk melakukan pemogokan. Tahun-tahun sebelumnya, pekerja dan pengusaha jarang mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan, dan pekerja jarang memberikan pemberitahuan resmi untuk maksud mereka dalam melakukan pemogokan, karena prosedur Departemen Tenaga Kerja yang lamban dan hanya mempunyai sedikit kredibilitas di antara pekerja. Pengesahan Undang-Undang Tenaga Kerja dalam tahun 2003 tidak secara signifikan merubah situasi ini.

Pembayaran yang kurang atau tidak dibayarnya paket-paket pesangon yang diwajibkan secara hukum menimbulkan pemogokan dan protes pekerja. Solidarity Center mendokumentasi kasus-kasus dimana pengusaha asing di industri garmen dan alas kaki, yang menghadapi penurunan pesanan dan penutupan pabrik, melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari melakukan pembayaran pesangon yang diwajibkan secara hukum.

Para aktivis tenaga kerja juga melaporkan bahwa manajer pabrik di beberapa lokasi memperkerjakan para preman untuk mengintimidasi dan menyerang anggota serikat pekerja yang berusaha untuk mengorganisasi aksi-aksi pemogokan secara hukum. Sewaktu-waktu, polisi turut campur tangan dengan tidak semestinya dan secara paksa mencampuri masalah tenaga kerja, biasanya untuk melindungi kepentingan pengusaha. Pada tanggal 8 September, kira-kira 200 polisi menyerang pekerja yang melakukan pemogokan di PT Shamrock Manufacturing Corporation di Medan, sehingga terjadi bentrokan yang mencederai beberapa pekerja dan polisi. Para pekerja tersebut telah melakukan pemogokan selama 1 bulan, menyusul pemecatan oleh perusahaan terhadap 14 pengurus serikat yang berafiliasi dengan Serikat Pekerja Independen Medan. Menurut sumber media, perusahaan tersebut juga telah menggunakan preman setempat untuk menghentikan pemogokan. Untuk membuat standar etika dalam perselisihan tenaga kerja, polisi nasional secara penuh berpartisipasi di dalam program pelatihan hak pekerja yang diprakarsai ILO selama periode ini.

Menunggu pelaksanaan dari Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Tahun 2004 dan sistem pengadilan tenaga kerja yang baru, komite penyelesaian perselisihan tenaga kerja nasional dan daerah terus menjatuhkan putusan terhadap tuntutan diskriminasi anti-serikat pekerja. Keputusan komite dapat dimohon banding kepada Pengadilan Administrasi Negara. Namun, karena sejarah keputusan yang merugikan terhadap tenaga kerja dan waktu lama yang diperlukan untuk memproses perselisihan yang kadang-kadang memerlukan bertahun-tahun, banyak serikat pekerja yakin bahwa komite tersebut bukan merupakan alternatif yang realistis untuk menyelesaikan perselisihan. Akibatnya, pekerja seringkali menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Komnas HAM, DPR, atau LSM. Keputusan administratif yang menguntungkan pekerja yang dipecat biasanya berbentuk pemberian uang, tetapi perusahaan jarang menerima pekerja untuk kembali bekerja. Undang-undang mewajibkan pengusaha untuk mendapatkan persetujuan dari komite penyelesaian perselisihan tenaga kerja sebelum memecat pekerja, tetapi pengusaha sering mengabaikan undang-undang tersebut pada prakteknya.

Tidak ada undang-undang yang khusus atau kekecualian dari undang-undang tenaga kerja reguler di wilayah pemrosesan ekspor (EPZ). Namun, pengamat non-pemerintah, termasuk Solidarity Center, menggambarkan sentimen dan tindakan anti-serikat pekerja yang lebih kuat oleh pengusaha di EPZ.

c. Pelarangan Kerja Paksa atau Kerja Wajib

Undang-undang melarang kerja paksa atau kerja wajib, termasuk oleh anak-anak; namun, terdapat laporan terjadinya praktek tersebut (lihat Bagian 5).

Pemerintah mentolerir bentuk-bentuk kerja wajib yang dipraktikkan di dalam proses penerimaan pekerja migran. Praktek yang tidak mengindahkan moral oleh agen perekrutan pekerja migran, atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan pelaksanaan yang buruk dari peraturan pemerintah kadang-kadang menjurus ke penjeratan hutang dan pengurangan secara tidak sah untuk waktu yang lama. Menurut laporan pers dan penelitian oleh Solidarity Center, agen perekrutan seringkali menahan pekerja migran di dalam pusat penahanan selama berbulan-bulan sebelum mengirim mereka ke luar negeri. Saat berada di dalam pusat penahanan, para pekerja migran biasanya tidak menerima upah, dan para pencari tenaga kerja kadang-

kadang tidak mengizinkan mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Dalam banyak hal, pekerja dipaksa untuk membayar kepada para pencari tenaga kerja biaya dari penahanan mereka secara paksa, yang mengakibatkan hutang-hutang yang besar kepada para pencari tenaga kerja. Apa yang digambarkan oleh Solidarity Center dan LSM lain sebagai kejadian yang lazim, oleh harian Jakarta Post dilaporkan dalam bulan Juli bahwa para penjaga di pusat penahanan pekerja migran menangkap dan memukul Fadijah, seorang calon pekerja, yang berusaha untuk melarikan diri dari pusat penahanan tersebut di Jakarta Selatan. Penduduk setempat menyelamatkan Fadijah dan membawa para penjaga ke pos polisi setempat. Karena lelah menunggu pekerjaan yang dijanjikan di Malaysia, Fadijah melaporkan bahwa dia berusaha untuk pulang ke rumah, tetapi PJTKI tidak mengizinkannya untuk meninggalkan pusat tersebut sebelum dia dapat membayar hutang sebesar US\$ 280 (Rp. 2,5 juta).

Kerja paksa dan kerja wajib oleh anak-anak terjadi (lihat Bagian 6.d.).

d. Pelarangan Pekerja Anak dan Usia Minimum Untuk Bekerja

Undang-undang melarang anak-anak untuk bekerja di sektor-sektor yang berbahaya dan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, yang mencakup pertambangan, penyelaman, konstruksi, prostitusi, dan platform penangkapan ikan lepas pantai. Namun, pemerintah tidak melaksanakan undang-undang tersebut secara efektif. Undang-undang, peraturan, dan praktek mengakui bahwa beberapa anak harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Undang-Undang Tenaga Kerja melarang untuk memperkerjakan anak-anak, yang didefinisikan sebagai di bawah usia 18 tahun, dengan pengecualian bagi mereka berusia 13 sampai 15 tahun yang boleh bekerja tidak lebih dari 3 jam sehari dan hanya dengan sejumlah syarat-syarat lain, seperti persetujuan orang tua, tidak bekerja selama jam sekolah, serta pembayaran upah yang sah. Undang-undang tampaknya tidak mengemukakan pengecualian bagi anak-anak berusia 16 sampai 17 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nasional mencantumkan eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk prostitusi anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak-anak dalam perdagangan narkotik. Undang-undang menetapkan hukuman pidana yang berat dan hukuman penjara bagi orang-orang yang melanggar hak anak-anak. Selama tahun ini, pemerintah menggunakan undang-undang ini untuk sejumlah kecil kasus.

Pemerintah mempunyai Rencana Aksi Nasional untuk menghapus bentuk terburuk pekerja anak, maupun Rencana Aksi Nasional tersendiri untuk memerangi perdagangan anak dan untuk menghapus eksploitasi seks komersial terhadap anak.

Pekerja anak tetap merupakan masalah yang serius di dalam negeri. Diperkirakan bahwa 6 sampai 8 juta anak melampaui batas bekerja 3 jam sehari yang sah, bekerja di bidang pertanian, asongan, pertambangan, konstruksi, prostitusi, dan bidang-bidang lain. Lebih banyak anak bekerja di sektor informal daripada di sektor formal. Beberapa anak bekerja di pabrik yang besar, tetapi jumlah mereka tidak diketahui, sebagian besar karena dokumen yang membuktikan umur dapat dengan mudah dipalsukan. Anak-anak bekerja dalam industri seperti mebel rotan dan kayu, garmen, alas kaki, pengolahan makanan, dan pembuatan mainan, dan juga di pertambangan skala kecil. Banyak anak perempuan antara 14 dan 16 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang tinggal dengan majikannya. Secara tidak resmi ILO memperkirakan bahwa 700.000 anak bekerja sebagai pembantu. Banyak pembantu anak tidak diizinkan untuk sekolah dan dipaksa untuk bekerja selama jam-jam yang panjang, menerima upah yang rendah, dan pada umumnya tidak mengetahui hak-hak mereka.

Undang-undang dan peraturan melarang kerja paksa oleh anak-anak; namun, Pemerintah tidak efektif dalam menghapus pekerja paksa anak, yang tetap merupakan masalah yang serius. jumlah anak-anak yang signifikan bekerja di luar kemauan mereka dalam bidang prostitusi, pornografi, mengemis, perdagangan narkotik, pelayanan rumah tangga, dan situasi eksploitatif lainnya, termasuk sejumlah kecil yang bekerja di jermal (lihat Bagian 5).

Penegakan Undang-Undang Pekerja Anak sebagian besar masih tetap tidak efektif. Walaupun ada langkah-langkah legislatif dan peraturan, sebagian besar anak-anak yang bekerja, termasuk sebagai pembantu rumah tangga, melakukan hal tersebut dalam lingkungan yang tidak teratur. Pengalaman menunjukkan kesan bahwa para pejabat dinas tenaga kerja melakukan sedikit investigasi tentang pekerja anak.

e. Kondisi Yang Layak Untuk Bekerja

Pemerintah propinsi dan kabupaten, bukan pemerintah pusat, menetapkan upah minimum, yang berbeda menurut propinsi, kecamatan, dan sektor. Pemerintah propinsi menetapkan tingkat upah minimum propinsi berdasarkan usulan oleh komisi upah propinsi bipartit (pekerja, pengusaha, dan pemerintah). Angka upah minimum propinsi membuat dasar bagi upah minimum di propinsi. Pemerintah daerah tingkat dua setempat menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang menggunakan tingkat propinsi sebagai referensi. Pemerintah daerah tingkat dua juga menetapkan upah minimum dalam beberapa sektor industri atas dasar ad hoc. Propinsi dan Pemerintah daerah tingkat dua melakukan negosiasi upah minimum tahunan, yang kadang-kadang menghasilkan kontroversi dan protes.

Tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh sebagian besar pemerintah daerah tidak memberikan kepada seorang pekerja dan keluarganya sesuai standar hidup yang layak. Sebagian besar upah minimum tingkat propinsi berada di bawah perhitungan pemerintah sendiri tentang kebutuhan minimum dasar. Jakarta menawarkan tingkat upah minimum yang tertinggi sebesar US\$ 74 (Rp. 671.550) per bulan, sementara Jawa Timur menetapkan yang paling rendah yaitu sebesar US\$ 34 (Rp. 310.000) per bulan. Dalam bulan Desember para pekerja di Jakarta memprotes keputusan Gubernur untuk menaikkan upah minimum bulanan hanya dengan 6 persen menjadi US\$ 78 (Rp.711.843), yang berada di bawah standar hidup minimum yang ditetapkan pemerintah. Para pengusaha memperdebatkan bahwa menaikkan tingkat upah, di antara sejumlah faktor lain, membuat para pekerja negara ini kurang kompetitif secara internasional dan membatasi pertumbuhan peluang kerja di dalam industri.

Para pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan upah minimum. Pelaksanaannya tetap tidak cukup, khususnya di perusahaan yang lebih kecil dan di sektor informal. Dalam praktek, tingkat upah minimum yang resmi hanya berlaku di sektor formal yang merupakan 35 persen dari angkatan kerja.

Undang-undang tenaga kerja dan peraturan menteri memberikan pekerja beraneka ragam keuntungan. Orang yang bekerja di fasilitas yang lebih modern kadang-kadang menerima tunjangan kesehatan, hak istimewa uang makan, dan uang transpor. Undang-undang juga mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan para pekerjanya pada JAMSOSTEK dan membayar kontribusi kepada JAMSOSTEK, yaitu instansi asuransi milik negara; namun, menurut JAMSOSTEK, pada akhir tahun perusahaan-perusahaan hanya mendaftarkan 23 juta pekerja.

Undang-undang menetapkan 40 jam kerja seminggu dengan jam istirahat 30 menit setiap 4 jam bekerja. Perusahaan kadang-kadang mewajibkan 5 setengah atau 6 hari kerja seminggu. Undang-undang juga mewajibkan paling sedikit 1 hari istirahat dalam seminggu. Upah lembur harian adalah 1½ kali upah normal sejam untuk jam pertama dan menggandakan upah per jamnya bagi lembur tambahan dengan maksimum 3 jam kerja lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam seminggu. Para pekerja di industri yang memproduksi barang eceran untuk ekspor seringkali bekerja lembur untuk memenuhi kuota kontrak. Serikat pekerja mengeluh bahwa perusahaan mengandalkan lembur yang berlebihan di beberapa pabrik pemasangan elektronik, yang merugikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Pengamatan terhadap undang-undang yang mengatur tunjangan dan standar kerja bervariasi antara sektor dan wilayah. Pelanggaran oleh pengusaha terhadap persyaratan hukum cukup umum, yang mengakibatkan beberapa pemogokan dan protes. Departemen Tenaga Kerja terus mendesak pengusaha untuk memenuhi undang-undang; namun, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah terhadap standar tenaga kerja masih lemah.

Undang-undang dan peraturan menetapkan standar minimum dari kesehatan dan keselamatan industrial. Dalam praktek, catatan keselamatan pekerja di negara ini buruk. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan pers, JAMSOSTEK mencatat 105.846 kecelakaan kerja dalam tahun 2003, peningkatan dari 103.804 dalam tahun 2002. Para pejabat Disnaker setempat bertanggung jawab untuk menjalankan standar-standar kesehatan dan keselamatan.

Di perusahaan yang lebih besar kualitas dari program kesehatan dan keselamatan kerja sangat bervariasi. Standar kesehatan dan keselamatan di perusahaan yang lebih kecil dan di sektor informal cenderung lebih buruk atau tidak ada. Pekerja diwajibkan untuk melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan pengusaha dilarang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan balasan terhadap mereka yang melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, namun, undang-undang tidak dijalankan secara efektif.